

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2023**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan.

LKjIP Tahun 2023 salah satu bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ((SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus sebagai bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Jepara, yang mana Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcome*.

Penyusunan LKjIP Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LKjIP Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksanaan kegiatan. Semoga LKjIP Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dapat mencerminkan kinerja Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.

Jepara, Januari 2024

Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara



DENI HENDARKO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690623 199001 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GRAFIK

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
	C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	12
	D. Keadaan Pegawai	13
	E. Keadaan Sarana dan Prasarana	14
	F. Landasan Hukum	14
	G. Sistematika	15
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	17
	A. Rencana Strategis	17
	B. Perencanaan Kinerja	17
	C. Perjanjian Kinerja	18
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	23
	A. Capaian Kinerja Organisasi	23
	B. Realisasi Anggaran	28
BAB IV	PENUTUP	31
	A. Kesimpulan	31
	B. Rekomendasi	32

LAMPIRAN :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD	13
Tabel 1.2 ASN Sekretariat DPRD berdasarkan Golongan	13
Tabel 1.3 ASN Sekretariat DPRD berdasarkan Pendidikan	14
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Periode 2023-2026	17
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023	18
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	18
Tabel 2.4 Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2023	19
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023	24
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022, 2023 dan 2026	25
Tabel 3.3 Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional	27
Tabel 3.4 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan	28

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD	3

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Gambar 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022, 2023 dan 2026	25

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan pencapaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara selama Tahun 2023. Capaian kinerja Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan Kinerja Tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dari program/kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian Tahun 2023 sudah baik dan kedepan perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban suatu Instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas Kinerja adalah amanat dari para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik. Sekretariat DPRD selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dan sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2017 untuk periode tahun 2017-2022. Periode Kepala Daerah ini menjadi dasar dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Jepara, yaitu tahun 2017-2022. Pemilihan Kepala Daerah periode berikutnya direncanakan pada tahun 2022. Akan tetapi, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pemungutan suara

serentak nasional dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di seluruh NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan periode perencanaan pasca selesainya RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 sampai pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2023 yang dimaksud sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang administrasi kesekretariatan, keuangan, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Pimpinan DPRD Kabupaten Jepara dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Gambar 1.1

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jeara



Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2021.

Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan fungsi unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang administrasi kesekretariatan, kuangan, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten; dan
- Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai fungsinya pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- Sekretaris DPRD;

- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Program dan Keuangan;
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas, membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Tata Usaha, Rumah Tangga, Urusan Perlengkapan, Penyelenggaraan Rapat-Rapat dan Urusan Perjalanan Dinas di Bagiannya.

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- d. Pemfasilitasian pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. Penyediaan fasilitas fraksi DPRD;
- g. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD; dan
- h. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. Penyelenggaraan pengelolaan asset yang menjadi tanggungjawab DPRD.

Bagian Umum terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang tata usaha dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD, meliputi :

- Melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD;
- Melaksanakan kearsipan;
- Menyusun administrasi kepegawaian;
- Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- Menyelenggarakan urusan Perjalanan Dinas di Bagiannya;
- Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; dan
- Menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, perumusan, evaluasi serta pelaporan bidang rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat DPRD, meliputi :

- Mengatur dan pemeliharaan kebersihan kantor dan taman di kompleks Sekretariat DPRD;
- Mengatur dan pemeliharaan halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD;
- Mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
- Memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
- Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;

- Mendistribusikan dan mengendalikan bahan perlengkapan;
- Merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
- Menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
- Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
- Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bagian Program dan Keuangan

Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas, membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang administrasi perencanaan dan keuangan DPRD.

Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- b. Pengevaluasian bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- c. Pemverifikasian perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- d. Pemverifikasian kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- e. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- f. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- g. Pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- h. Pemverifikasian pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- i. Pengevaluasian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- j. Pengoordinasian dan pengevaluasian laporan keuangan Sekretariat DPRD;

k. Pengevaluasian pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD; dan

l. Penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.

Bagian Program dan Keuangan terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran

Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Penganggaran, meliputi :

- Menyusun bahan perencanaan dan evaluasi;
- Menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;
- Menyelenggarakan urusan perjalanan dinas dibagiannya;
- Menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD; dan
- Merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi, dan Pelaporan

Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan, meliputi :

- Merencanakan pemverifikasian keuangan;
- Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- Mengoordinasikan kepada PPK, bendahara dan bendahara pembantu untuk pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS;
- Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- Merencanakan penatausahaan keuangan;
- Menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- Mengkoordinasikan kepada PPTK dan bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;
- Melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan sekretariat DPRD;
- Menganalisis laporan keuangan;
- Menganalisis laporan kinerja; dan

- Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas, membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kajian Perundang-undangan, Humas dan Publikasi serta Persidangan, Risalah dan Protokol.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- b. Pemfasilitasian penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. Pemfasilitasian penyusunan naskah akademik dan draft raperda inisiatif;
- d. Pemverifikasian, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengumpulan bahan penyiapan draft raperda inisiatif;
- f. Pemfasilitasian penyelenggaraan persidangan;
- g. Penyusunan risalah rapat;
- h. Pengkoordinasian pembahasan raperda;
- i. Pemverifikasian, pengkoordinasian dan evaluasi Daftar Inventaris Masalah (DJM);
- j. Pemverifikasian, pengkoordinasian dan evaluasi risalah rapat;
- k. Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- l. Penyelenggaraan publikasi; dan
- m. Penyelenggaraan keprotokolan;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai tugas dan fungsinya

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional selain melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya, juga melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

Sub Koordinator terdiri atas :

a. Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan, Humas dan Publikasi

Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan, Humas dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kajian Perundang-undangan, Humas dan Publikasi, meliputi :

- Melaksanakan kajian perundang-undangan;
- Membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
- Menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
- Membuat konsep bahan penyiapan draft Perda Inisiatif;
- Merancang bahan pembahasan Peraturan Daerah;
- Menyelenggarakan urusan perjalanan dinas di bagiannya;
- Menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM); dan
- Menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Koordinator Persidangan, Risalah dan Protokol

Sub Koordinator Persidangan, Risalah dan Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang persidangan, risalah dan protokol, meliputi :

- Merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
- Menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
- Menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
- Memfasilitasi rapat-rapat DPRD;
- Menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerja DPRD;
- Merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- Menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;

- Merencanakan kegiatan DPRD; dan
- Merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitas, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi dibidang fasilitas penganggaran dan fasilitas, pengawasan, kerjasama dan aspirasi.

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Pemfasilitasian, verifikasi dan pengkoordinasian pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. Fasilitas, verifikasi dan pengkoordinasian Pembahasan APBD/APBDP;
- c. Fasilitas, verifikasi dan pengkoordinasian pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Fasilitas, verifikasi dan pengkoordinasian pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. Fasilitas, verifikasi dan pengkoordinasian pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. Fasilitas, verifikasi dan pengkoordinasian pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. Fasilitas, verifikasi dan pengkoordinasian aspirasi masyarakat saat reses;
- h. Fasilitas, pengkoordinasian dan pengevaluasian rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. Fasilitas, verifikasi dan pengkoordinasian pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. Fasilitas, verifikasi dan pengkoordinasian dukungan pengawasan penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan;

- k. Fasilitasi, verifikasi dan pengkoordinasian penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, dan
- l. Fasilitasi, verifikasi dan pengkoordinasian persetujuan kerjasama daerah;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional selain melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya juga melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Sub Koordinator terdiri atas :

a. Sub Koordinator Fasilitasi Penganggaran

Sub Koordinator Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penganggaran, meliputi :

- Merencanakan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- Menyusun bahan pembahasan APBD/APBDP;
- Menyusun bahan pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- Menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- Menyelenggarakan urusan perjalanan dinas dibagiannya;
- Menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepada Daerah; dan
- Menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Koordinator Fasilitasi, Pengawasan, Kerjasama dan Aspirasi

Sub Koordinator Fasilitasi, Pengawasan, Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengawasan, kerjasama dan aspirasi, meliputi :

- Mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- Merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
- Menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- Menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- Memfasilitasi reses DPRD;
- Merencanakan kegiatan *hearing*/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- Menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
- Menyelenggarakan urusan perjalanan dinas di bagiannya;
- Menyusun pokok-pokok pikiran DPRD; dan
- Melaksanakan kerjasama sekretariat DPRD dan DPRD;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai tugas dan fungsinya.

C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan fungsi unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang administrasi kesekretariatan, keuangan, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Identifikasi permasalahan di Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara, yaitu kurang optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD.

Tabel pemetaan permasalahan pelayanan sekretariat DPRD Kabupaten Jepara seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Jepara

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Peran Sekretariat DPRD belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD kurang optimal	Kurangnya pemahaman Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada DPRD

D. Keadaan Pegawai

Sumber daya yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara berupa pegawai dan sarana prasarana pendukung. Adapun aset utama yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dalam melaksanakan tugas dan fungsi berupa Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2023 sebanyak 38 (tiga delapan) orang.

Jika dilihat dari komposisi golongan, diurutkan dari persentase terendah, sebanyak 2,6% atau masing-masing 1 orang menempati golongan IVC, IIIB dan IIC, kemudian 5,3% atau masing-masing 2 orang memiliki golongan IV B dan IIIC, kemudian 10,5% atau 4 orang memiliki golongan IIID, kemudian 15,8% atau 6 orang memiliki golongan IVA, kemudian 23,7% atau 9 orang memiliki golongan IIIA, kemudian 31,6% atau 12 orang memiliki golongan IID, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2
ASN Sekretariat DPRD Berdasarkan Golongan
Kabupaten Jepara

No	Golongan	Jumlah Tahun 2023	Persentase
1.	IVC	1	2,6
2.	IVB	2	5,3
3.	IVA	6	15,8
4.	IIID	4	10,5
5.	IIIC	2	5,3
6.	IIIB	1	2,6
7.	IIIA	9	23,7
8.	IID	12	31,6
9.	IIC	1	2,6
Jumlah		38	100

Sedangkan apabila dilihat komposisi pendidikan, 23,7% atau 9 orang berpendidikan S2, 9 orang berpendidikan S1, kemudian 5,3% atau 2 orang berpendidikan D3, kemudian 44,7% atau 17 orang berpendidikan SLTA, dan 2,6% atau 1 orang berpendidikan SLTP, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.3
ASN Sekretariat DPRD Berdasarkan Pendidikan
Kabupaten Jepara

No	Pendidikan	Jumlah Tahun 2023	Persentase
	S2	9	23,7
	S1	9	23,7
	D3	2	5,3
	SLTA	17	44,7
	SLTP	1	2,6
Jumlah		38	100

E. Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelayanan kepada DPRD Kabupaten Jepara. Sarana dan Prasarana berupa aset tetap dan aset bergerak yang menjadi tanggungjawab pengelolaannya pada Sekretariat DPRD sampai dengan Tahun 2023.

F. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

- Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026;
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026;
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023.

G. Sistematika

Sistematika penulisan LKjIP Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dan Renstra Tahun 2026;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dan ditambahkan solusi kegagalan atau penurunan kinerja sebagai bentuk Rencana Aksi, dari setiap sasaran strategis.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dalam Tahun 2023-2026 adalah :

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD;
- 2. Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah.

Sedangkan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kinerja DPRD;
- 2. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah.

Berikut Tujuan, Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Kondisi Akhir DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Periode 2023-2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Capaian Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja				Kondisi Akhir
						2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD		Opini kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	Opini	NA	Baik	Baik	Baik Sekali	Sangat Baik Sekali	Sangat Baik Sekali
		Meningkatnya kinerja DPRD	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	Persen	NA	95	95,5	96	96,5	96,5
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah		Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	70,5	75	76	77	78	78
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	Persen	100	95	96	97	98	98

B. Perencanaan Kinerja

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2023-

2026, maka rencana kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2023
Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD		Opini kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	Opini	Baik
		Meningkatnya kinerja DPRD	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	Persen	95
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah		Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	75
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	Persen	95

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja yang ditetapkan berdasarkan perencanaan kinerja sesuai Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kinerja DPRD	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	95%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	95%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.192.081.000	Dana transfer umum-dana alokasi umum
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	26.023.243.000	Dana transfer umum-dana alokasi umum

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara sebagai tabel berikut :

Tabel 2.4
Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2023
Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Targ et	Satuan	Pagu
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	90	%	5.192.081.000
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Admnistrasi Kepegawaian PD yang Tersusun	2	Dokumen	24.889.000
1.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Unit	2.000.000
1.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	22.889.000
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD yang Tersusun	8	Dokumen	1.749.805.000
2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	40.000.000
2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	56.900.000
2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	52.500.000
2.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	100.255.000
2.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	40.000.000
2.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	58.150.000
2.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	1.392.000.000
2.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	10.000.000
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Unit	100.600.000
3.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	600.000
3.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	100.000.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersusun	52	Laporan	1.417.868.000
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	30.000.000
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	332.308.000
4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	131.620.000

4.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	923.940.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	49	Unit	1.570.000.000
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	39	Unit	1.100.000.000
5.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25	Unit	10.120.000
5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	70.000.000
5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	220.000.000
5.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	169.880.000
6	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Terlayani Keuangan dan Kesejahteraan	50	Orang	6.000.000
6.1	Penyediaan Pakain Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1	Buah	4.500.000
6.2	Pelaksanaan Medical Ceck Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	1	Orang	1.500.000
7	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Tersusun	5	Dokumen	88.679.000
7.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	16.000.000
7.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000
7.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000
7.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	8.500.000
7.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	8.500.000
7.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	15.679.000
7.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	30.000.000
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang Tersusun	17	Dokumen	234.240.000
8.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	169.240.000
8.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	35.000.000
8.3	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Koordinasi	1	Dokumen	5.000.000

	Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
8.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	10.000.000
8.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	5.000.000
8.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	5.000.000
8.7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	5.000.000
II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	97,5	%	26.023.243.000
1	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	5	Dokumen	1.335.328.000
1.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	Dokumen	336.134.000
1.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	Dokumen	172.620.000
1.3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	Dokumen	130.000.000
1.4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	Dokumen	345.294.000
1.5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	Dokumen	351.280.000
2	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan dan Rekomendasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	121	Laporan	4.586.729.000
2.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	30	Laporan	1.175.000.000
2.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	30	Laporan	1.142.500.000
2.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	30	Laporan	1.149.000.000
2.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	30	Laporan	1.105.500.000
2.5	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	Dokumen	14.729.000
3	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5	Dokumen	3.102.600.000
3.1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1	Laporan	8.500.000
3.2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	Dokumen	39.100.000
3.3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	Dokumen	3.055.000.000
4	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	11	Laporan	395.000.000

		DPRD			
4.1	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	11	Laporan	395.000.000
5	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	30	Dokumen	8.591.201.000
5.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	Dokumen	648.351.000
5.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8	Dokumen	1.377.000.000
5.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	16	Dokumen	6.140.000.000
5.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4	Dokumen	400.850.000
5.5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	Dokumen	25.000.000
6	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	32	Dokumen	5.152.385.000
6.1	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	Dokumen	2.370.000.000
6.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12	Dokumen	2.142.385.000
6.3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	5	Orang	240.000.000
6.4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8	Orang	384.000.000
6.5	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	Dokumen	16.000.000
7	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	101	Dokumen	2.860.000.000
7.1	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kellengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	104	Laporan	120.000.000
7.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaa Tugas Badan Musyawarah	11	Dokumen	875.000.000
7.3	Failitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	34	Dokumen	1.865.000.000

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara, pada Tahun 2023 telah direncanakan sebanyak 2 Program, 15 Kegiatan, dan 64 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp 31.215.324.000,- dari penetapan program, kegiatan, dan sub kegiatan ada 2 tujuan, 2 sasaran, dan 4 indikator kinerja yang akan dicapai.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas sesuai yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Sementara itu, predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai <100% dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

No	Katergori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1.	Sangat Baik	>90	
2.	Baik	75.00-89.99	
3.	Cukup	65.00-74.99	
4.	Kurang	50.00-64.99	
5.	Sangat Kurang	0-49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023
Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD		Opini kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	Opini	Baik	Baik	100	Sangat Baik
		Meningkatnya kinerja DPRD	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	Persen	95	95	100	Sangat Baik
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah		Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	75	85,75	114	Sangat Baik
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	Persen	95	95	100	Sangat Baik

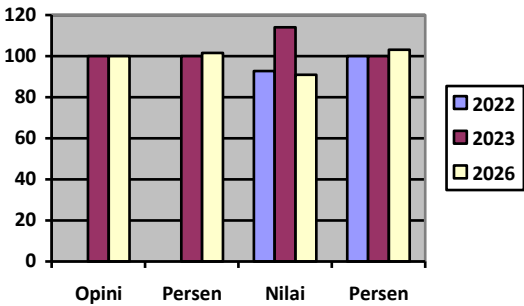
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan Renstra Tahun 2026

Realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022, 2023 dan 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023			2026		Tingkat Kemajuan
					Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target Akhir	Capaian %	
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD		Opini kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	Opini	-	-	-	Baik	Baik	100	Sangat Baik Sekali	100	Sangat Baik
		Meningkatnya kinerja DPRD	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	Persen	-	-	-	95	95	100	96,5	101,6	Sangat Baik
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan PD		Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	90	83,36	92,6	75	85,75	114	78	91	Sangat Baik
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	Persen	100	100	100	95	95	100	98	103,2	Sangat Baik

Grafik 3.1.
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022, 2023 dan 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara



Perbandingan capaian kinerja pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2022 terjadi peningkatan untuk Nilai SKM Perangkat Daerah. Namun demikian hasil perbandingan ini hanya berdasarkan data yang ada saja, karena penetapan tujuan dan sasaran di tahun sebelumnya ada yang berbeda (beda periode Renstra dan indikator yang ditetapkan).

3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.3
Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional
Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Standar Nasional	% Capaian
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD		Opini kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	Opini	Baik	-	-
2.		Meningkatnya kinerja DPRD	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	Persen	95	-	-
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan PD		Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	85,75	-	-
4.		Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	Persen	95	-	-

Sampai dengan saat ini belum ada penerapan standar nasional untuk Sekretariat DPRD sehingga tidak bisa dibandingkan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan sebagai berikut :

- Pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD kepada DPRD sudah baik, dengan demikian dikatakan berhasil. Mempertahankan dan meningkatkan untuk tahun berikutnya dalam memberikan pelayanan kepada DPRD.
- Agenda DPRD dapat selesai tepat waktu, dengan demikian dikatakan berhasil. Melaksanakan kegiatan yang sudah diagendakan dengan tepat waktu sesuai dengan agenda yang sudah dijadwalkan.
- Masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan, dengan demikian dikatakan berhasil. Mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- Kinerja yang dilaksanakan sudah sesuai dengan target yang dibuat, dengan demikian dikatakan berhasil. Melaksanakan

program, kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan target yang dibuat sesuai dengan perencanaan dalam penyusunan di DPA.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tingkat efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

- Target kinerja untuk sasaran meningkatnya kinerja DPRD sebesar 95%, realisasi sebesar 95%. Dengan demikian capaian kinerja sebesar 100%.

Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dengan pagu anggaran sebesar Rp 26.023.243.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 24.319.860.184,- dengan demikian capaian anggaran sebesar Rp 93,5%.

- Target kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah sebesar 95%, realisasi sebesar 95%. Dengan demikian capaian kinerja sebesar 100%.

Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.192.081.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 4.895.143.083,- dengan demikian capaian anggaran sebesar Rp 94,3%.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dan ditambahkan solusi kegagalan atau penurunan kinerja sebagai bentuk Rencana Aksi, dari setiap sasaran strategis

- Tujuan : meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD.

Indikator kinerja : opini kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD. Capaian Baik.

Sasaran : meningkatnya kinerja DPRD. Indikator kinerja 1 : persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu. Capaian 100%.

- Tujuan : meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja : Nilai SKM Perangkat daerah. Capaian 114%.

Sasaran : meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah.
Indikator kinerja 2 : persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target. Capaian 100%.

Semua kegiatan menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.4
Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH/ (KURANG)
		Rupiah	%	
BELANJA DAERAH	31.215.324.000	29.215.003.267	93,59	2.000.320.733
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.192.081.000	4.895.143.083	94,3	296.937.917
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	88.679.000	87.912.300	99,1	766.700
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	16.000.000	15.908.000	99,4	92.000
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	5.000.000	4.965.000	99,3	35.000
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	5.000.000	4.943.000	98,9	57.000
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	8.500.000	8.372.000	98,5	128.000
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	8.500.000	8.417.500	99,0	82.500
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15.679.000	15.493.400	98,8	185.600
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	30.000.000	29.813.400	99,4	186.600
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	234.240.000	213..092.300	90,97	21.147.700
PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	169.240.000	152.036.800	89,8	17.203.200
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	35.000.000	32.445.500	92,7	2.554.500
KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	5.000.000	4.889.000	97,8	111.000
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	10.000.000	9.772.000	97,7	228.000
PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	5.000.000	4.860.000	97,2	140.000
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	5.000.000	4.593.000	91,9	407.000
PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	5.000.000	4.496.000	89,9	504.000
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	24.889.000	24.202.200	97,2	686.800

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	2.000.000	1.980.000	99,0	20.000
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	22.889.000	22.222.200	97,1	666.800
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.749.805.000	1.700.016.306	97,2	49.788.694
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	40.000.000	39.744.500	99,4	255.500
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	56.900.000	56.077.375	98,6	822.625
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	52.500.000	51.063.000	97,3	1.437.000
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	100.255.000	100.053.890	99,8	201.110
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	40.000.000	39.367.370	98,4	632.630
FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	58.150.000	57.813.690	99,4	336.310
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.392.000.000	1.345.896.481	96,7	46.103.519
PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	10.000.000	10.000.000	100,0	0
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100.600.000	98.491.800	98,5	1.508.200
PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	600.000	0	0,0	600.000
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	100.000.000	98.491.800	98,5	1.508.200
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.417.868.000	1.238.943.749	87,4	178.924.251
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	30.000.000	29.681.000	98,9	319.000
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	332.308.000	275.482.749	82,9	56.825.251
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	131.620.000	128.480.000	97,6	3.140.000
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	923.940.000	805.300.000	87,2	118.640.000
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.570.000.000	1.532.484.428	97,6	37.515.572
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1.100.000.000	1.069.315.928	97,2	30.684.072
PEMELIHARAAN MEBEL	10.120.000	10.086.000	99,7	34.000
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	70.000.000	68.877.000	98,4	1.123.000
PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	220.000.000	216.798.000	98,5	3.202.000
PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	169.880.000	167.407.500	98,5	2.472.500
LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	6.000.000	0	0	6.000.000
PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	4.500.000	0	0,0	4.500.000
PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	1.500.000	0	0,0	1.500.000
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	26.023.243.000	24.319.860.184	93,5	1.703.382.816
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	8.591.201.000	8.214.241.125	95,6	376.959.875
PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN	648.351.000	575.602.500	88,8	72.748.500

DAERAH				
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	1.377.000.000	1.136.667.050	82,6	240.332.950
PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.140.000.000	6.088.505.700	99,2	51.494.300
FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK	400.850.000	395.039.875	98,6	5.810.125
PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD	25.000.000	18.426.000	73,7	6.574.000
PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	1.335.328.000	1.241.188.500	93,0	94.139.500
PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	336.134.000	334.545.700	99,5	1.588.300
PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	172.620.000	170.327.400	98,7	2.292.600
PEMBAHASAN APBD	130.000.000	126.637.500	97,4	3.362.500
PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN	345.294.000	266.749.100	77,3	78.544.900
PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	351.280.000	342.928.800	97,6	8.351.200
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	4.586.729.000	3.935.732.180	85,8	650.996.820
PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	1.175.000.000	1.034.804.960	88,1	140.195.040
PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR	1.142.500.000	1.009.214.240	88,3	133.285.760
PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.149.000.000	946.441.980	82,4	202.558.020
PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN	1.105.500.000	932.412.000	84,3	173.088.000
PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH	14.729.000	12.859.000	87,3	1.870.000
PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	5.152.385.000	4.983.444.829	96,7	168.940.171
PENDALAMAN TUGAS DPRD	2.370.000.000	2.224.255.500	93,9	145.744.500
PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	2.142.385.000	2.119.586.329	98,9	22.798.671
PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	240.000.000	240.000.000	100,0	0
PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	384.000.000	384.000.000	100,0	0
PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD	16.000.000	15.603.000	97,5	397.000
PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	3.102.600.000	3.000.528.200	96,7	102.071.800
KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH	8.500.000	7.060.200	83,1	1.439.800
PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	39.100.000	37.165.500	95,1	1.934.500
PELAKSANAAN RESES	3.055.000.000	2.956.302.500	96,8	98.697.500
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	395.000.000	365.050.000	92,4	29.950.000
PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	395.000.000	365.050.000	92,4	29.950.000
FASILITASI TUGAS DPRD	2.860.000.000	2.579.675.350	90,2	280.324.650
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DPRD	120.000.000	98.775.200	82,3	21.224.800
FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH	875.000.000	788.597.400	90,1	86.402.600
FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	1.865.000.000	1.692.302.750	90,7	172.697.250

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara merupakan pertanggungjawaban secara tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara untuk Tahun Anggaran 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak. Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara pada Tahun 2023 dapat menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja sasaran, dan sebagai analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan total 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan rencana kinerja tahunan dan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran, secara umum 2 (empat) indikator telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 31.215.324.000,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp 29.215.003.267,- sehingga masih terdapat Silpa sebesar Rp 2.000.320.733,-

Penyerapan anggaran pada Tahun 2023 sebesar 93,59% dari anggaran yang direncanakan, hal ini menunjukkan bahwa perencanaan

Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara perlu ditingkatkan lagi agar lebih efektif dan efisien.

B. REKOMENDASI

Capaian kinerja pada Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dapat menjadi titik tolak dalam meningkatkan kinerja untuk mencapai sasaran dan target yang akan ditetapkan pada tahun berikutnya. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dan sesuai dengan analisis dari kesimpulan yang telah disebutkan, berikut ini beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya :

1. Pelaksanaan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan agar lebih dipertahankan dan ditingkatkan lagi sehingga seluruh target kinerja yang diperjanjikan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Sistem monitoring mandiri sedapat mungkin dibangun dari level pelaksana sampai dengan eselon tertinggi, sehingga pencapaian kinerja setiap level dapat terpantau setiap waktu guna mewujudkan kinerja yang diharapkan;
2. Pencapaian kinerja yang telah sesuai target untuk dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Sedangkan untuk pencapaian kinerja yang belum sesuai target perlu dilakukan evaluasi secara mendalam untuk memperoleh data yang valid untuk mengatasi permasalahan yang ada, sehingga nantinya pada akhir periode Renstra, kinerja yang ditetapkan dapat tercapai;
3. Perlunya pemahaman dan kerja sama dari semua pihak dalam pelaksanaan SAKIP baik di tingkat OPD maupun lintas OPD, sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi dapat segera diwujudkan.

Jepara, Januari 2024

Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara


DENI HENDARKO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690623 199001 1 001



PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN **2023**

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN JEPARA



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DENI HENDARKO, S.Sos, MM**
Jabatan : **SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JEPARA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM**
Jabatan : **Pj. BUPATI JEPARA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
Pj. BUPATI JEPARA

EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD
KAB. JEPARA

DENI HENDARKO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690623 199001 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan Tepat Waktu	95%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang Mencapai Target	95%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	43.019.475.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	26.023.243.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Jepara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
Pj. BUPATI JEPARA

EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD KAB JEPARA


DENI HENDARKO, S.Sos, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690623 199001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Pemuda No. 106 Telp. (0291) 591103 Fax. 594173
JEPARA 59411

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOH EKO UDYYONO, S.IP, MH**
Jabatan : **KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN**
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DENI HENDARKO, S.Sos, MM**
Jabatan : **SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JEPARA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

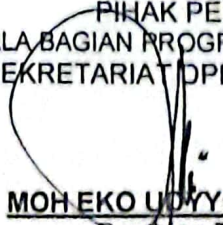
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JEPARA

DENI HENDARKO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690623 199001 1 001

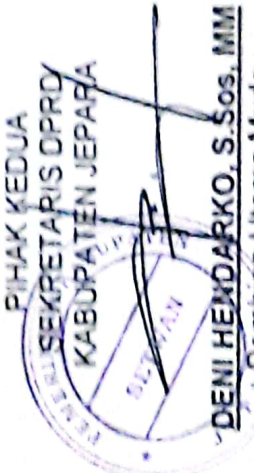
PIHAK PERTAMA
KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD KAB JEPARA

MOH EKO UDYYONO, S.IP, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19730501 199311 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KABAG PROGRAM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	90%
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Tersusun	5 Dokumen
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang Tersusun	17 Dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.643.159.000	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 88.679.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.554.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jepara, 20 September 2023


PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JEPARA
DENI HENDARKO, S.Sos, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690623 199001 1 001

PIHAK PERTAMA
KABAG PROGRAM DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD KAB JEPARA

MOH EKO-UDYONO, S.I.P, MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19730501 199311 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Pemuda No. 106 Telp. (0291) 591103 Fax. 594173
JEPARA 59411

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NARYONO, S.IP, MM**
Jabatan : **KEPALA BAGIAN UMUM**
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DENI HENDARKO, S.Sos, MM**
Jabatan : **SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JEPARA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

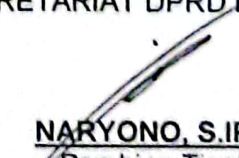
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JEPARA


DENI HENDARKO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690623 199001 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DPRD KAB JEPARA


NARYONO, S.IP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19691128 198903 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KABAG UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	90%
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD yang Tersusun	2 Dokumen
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD yang Tersusun	8 Dokumen
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Unit
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersusun	52 Laporan
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	49 Unit
6.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Terlayani Keuangan dan Kesejahteraan	50 Orang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 37.376.316.000	
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 24.889.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.749.805.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 100.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.417.868.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Rp 1.570.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	Urusan Pemerintahan Daerah		
6.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp 32.513.154.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jepara, 20 September 2023

PIHAK PERTAMA
KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DPRD KAB-JEPARA

NARYONO, S.IP., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19691128 198903 1 004

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JEPARA

The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text 'DPRD KABUPATEN JEPARA' at the top and 'JEPARA' at the bottom. The inner circle contains the text 'SEKRETARIAT' on the left and 'DPRD' on the right. In the center, there is a signature and the text 'DENI RENDARKO, S.Sos., MM' and 'Pembina Utama Muda'.

DENI RENDARKO, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690623 199001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Pemuda No. 106 Telp. (0291) 591103 Fax. 594173
JEPARA 59411

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAHMUD HARTONO, S.Sos, MH**
Jabatan : **KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DENI HENDARKO, S.Sos, MM**
Jabatan : **SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JEPARA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JEPARA



DENI HENDARKO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690623 199001 1 001

PIHAK PERTAMA
KABAG PERSIDANGAN DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DPRD KAB JEPARA



MAHMUD HARTONO, S.Sos, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680629 198803 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	97,5%
1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	30 Dokumen
2.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	32 Dokumen
3.	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	101 Dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 16.603.586.000	
1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp 8.591.201.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp 5.152.385.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp 2.860.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jepara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
 SEKRETARIS DPRD
 KABUPATEN JEPARA

DENI HENDARKO, S.Sos, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690623 199001 1 001

PIHAK PERTAMA
 KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
 SEKRETARIAT DPRD KAB JEPARA

MAHMUD HARTONO, S.Sos, MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680629 198803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Pemuda No. 106 Telp. (0291) 591103 Fax. 594173
JEPARA 59411

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DASUKI, SE, M.Si**
Jabatan : **KABAG FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DENI HENDARKO, S.Sos, MM**
Jabatan : **SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JEPARA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

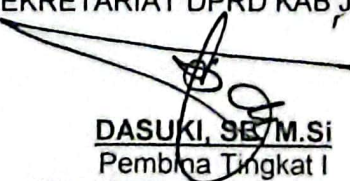
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JEPARA

DENI HENDARKO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690623 199001 1 001

PIHAK PERTAMA
KABAG FASILITASI PENGANGGARAN
DAN PENGAWASAN
SEKRETARIAT DPRD KAB JEPARA

DASUKI, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680416 199203 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KABAG FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA

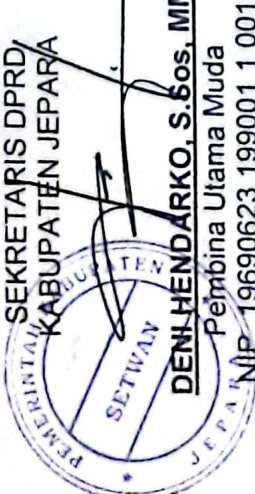
NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	97,5%
1.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	5 Dokumen
2.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan dan Rekomendasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	121 Laporan
3.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4 Dokumen dan 1 Laporan
4.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	11 Laporan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 9.419.657.000	
1.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp 1.335.328.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 4.586.729.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp 3.102.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp 395.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jepara, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
 SEKRETARIS DPRD
 KABUPATEN JEPARA



DENI HENDARKO, S.Sos, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690623 199001 1 001

PIHAK PERTAMA
 KABAG FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
 SEKRETARIAT DPRD KAB JEPARA



DASUKI, SE, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680416 199203 1 005

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA

TAHUN : 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH/ (KURANG)
			Rupiah	%	
5	BELANJA DAERAH	69.042.718.000	66.278.766.540	96,0	2.763.951.460
5.20801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	600.000	0	0,0	600.000
5.20801.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	600.000	0	0,0	600.000
5.20801.07.01	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	600.000	0	0,0	600.000
5.20801.07.01.1	BELANJA OPERASI	600.000	0	0,0	600.000
5.20801.07.01.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000	0	0,0	600.000
5.20801.07.01.1.02.01	BELANJA BARANG	600.000	0	0,0	600.000
5.20801.07.01.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000	0	0,0	600.000
5.20801.07.01.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	600.000	0	0,0	600.000
5.40201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	43.018.875.000	41.958.906.356	97,5	1.059.968.644
5.40201.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	88.679.000	87.912.300	99,1	766.700
5.40201.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	16.000.000	15.908.000	99,4	92.000
5.40201.01.01.1	BELANJA OPERASI	16.000.000	15.908.000	99,4	92.000
5.40201.01.01.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000	15.908.000	99,4	92.000
5.40201.01.01.1.02.01	BELANJA BARANG	16.000.000	15.908.000	99,4	92.000
5.40201.01.01.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.000.000	15.908.000	99,4	92.000
5.40201.01.01.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.103.000	3.076.000	99,1	27.000
5.40201.01.01.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	6.222.000	6.206.000	99,7	16.000
5.40201.01.01.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.500.000	3.500.000	100,0	0
5.40201.01.01.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.175.000	3.126.000	98,5	49.000
5.40201.01.02	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	5.000.000	4.965.000	99,3	35.000
5.40201.01.02.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	4.965.000	99,3	35.000
5.40201.01.02.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000	4.965.000	99,3	35.000
5.40201.01.02.1.02.01	BELANJA BARANG	5.000.000	4.965.000	99,3	35.000
5.40201.01.02.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000	4.965.000	99,3	35.000
5.40201.01.02.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	494.000	491.000	99,4	3.000
5.40201.01.02.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.116.000	1.102.000	98,8	14.000
5.40201.01.02.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.390.000	3.372.000	99,5	18.000
5.40201.01.03	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	5.000.000	4.943.000	98,9	57.000
5.40201.01.03.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	4.943.000	98,9	57.000
5.40201.01.03.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000	4.943.000	98,9	57.000
5.40201.01.03.1.02.01	BELANJA BARANG	5.000.000	4.943.000	98,9	57.000
5.40201.01.03.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000	4.943.000	98,9	57.000
5.40201.01.03.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	491.000	488.000	99,4	3.000
5.40201.01.03.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.364.000	1.334.000	97,8	30.000
5.40201.01.03.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.145.000	3.121.000	99,2	24.000
5.40201.01.04	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	8.500.000	8.372.000	98,5	128.000
5.40201.01.04.1	BELANJA OPERASI	8.500.000	8.372.000	98,5	128.000
5.40201.01.04.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000	8.372.000	98,5	128.000
5.40201.01.04.1.02.01	BELANJA BARANG	8.500.000	8.372.000	98,5	128.000
5.40201.01.04.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.500.000	8.372.000	98,5	128.000
5.40201.01.04.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.276.000	1.255.000	98,4	21.000
5.40201.01.04.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	744.000	696.000	93,6	48.000
5.40201.01.04.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.000.000	3.000.000	100,0	0
5.40201.01.04.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.480.000	3.421.000	98,3	59.000
5.40201.01.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	8.500.000	8.417.500	99,0	82.500
5.40201.01.05.1	BELANJA OPERASI	8.500.000	8.417.500	99,0	82.500
5.40201.01.05.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000	8.417.500	99,0	82.500
5.40201.01.05.1.02.01	BELANJA BARANG	8.500.000	8.417.500	99,0	82.500
5.40201.01.05.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.500.000	8.417.500	99,0	82.500
5.40201.01.05.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	780.000	755.500	96,9	24.500
5.40201.01.05.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.240.000	1.218.000	98,2	22.000
5.40201.01.05.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.000.000	3.000.000	100,0	0
5.40201.01.05.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.480.000	3.444.000	99,0	36.000
5.40201.01.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15.679.000	15.493.400	98,8	185.600
5.40201.01.06.1	BELANJA OPERASI	15.679.000	15.493.400	98,8	185.600
5.40201.01.06.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	15.679.000	15.493.400	98,8	185.600
5.40201.01.06.1.02.01	BELANJA BARANG	15.679.000	15.493.400	98,8	185.600
5.40201.01.06.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.679.000	15.493.400	98,8	185.600
5.40201.01.06.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	721.000	720.400	99,9	600
5.40201.01.06.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	6.200.000	6.148.000	99,2	52.000
5.40201.01.06.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.750.000	3.625.000	96,7	125.000
5.40201.01.06.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.008.000	5.000.000	99,8	8.000

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH/ (KURANG)
			Rupiah	%	
5.40201.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	30.000.000	29.813.400	99,4	186.600
5.40201.01.07.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	29.813.400	99,4	186.600
5.40201.01.07.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000	29.813.400	99,4	186.600
5.40201.01.07.1.02.01	BELANJA BARANG	22.106.000	21.973.400	99,4	132.600
5.40201.01.07.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.106.000	21.973.400	99,4	132.600
5.40201.01.07.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.844.000	1.844.000	100,0	0
5.40201.01.07.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	10.986.000	10.891.400	99,1	94.600
5.40201.01.07.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.276.000	9.238.000	99,6	38.000
5.40201.01.07.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	7.894.000	7.840.000	99,3	54.000
5.40201.01.07.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.894.000	7.840.000	99,3	54.000
5.40201.01.07.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.894.000	7.840.000	99,3	54.000
5.40201.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.554.480.000	5.257.700.542	94,7	296.779.458
5.40201.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.320.240.000	5.044.608.242	94,8	275.631.758
5.40201.02.01.1	BELANJA OPERASI	5.320.240.000	5.044.608.242	94,8	275.631.758
5.40201.02.01.1.01	BELANJA PEGAWAI	5.320.240.000	5.044.608.242	94,8	275.631.758
5.40201.02.01.1.01.01	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.005.286.000	2.799.805.321	93,2	205.480.679
5.40201.02.01.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.165.426.000	2.050.450.740	94,7	114.975.260
5.40201.02.01.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.165.426.000	2.050.450.740	94,7	114.975.260
5.40201.02.01.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	219.086.000	218.355.134	99,7	730.866
5.40201.02.01.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	219.086.000	218.355.134	99,7	730.866
5.40201.02.01.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	166.950.000	159.390.000	95,5	7.560.000
5.40201.02.01.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	166.950.000	159.390.000	95,5	7.560.000
5.40201.02.01.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	74.130.000	68.810.000	92,8	5.320.000
5.40201.02.01.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	74.130.000	68.810.000	92,8	5.320.000
5.40201.02.01.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	145.600.000	124.127.880	85,3	21.472.120
5.40201.02.01.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	145.600.000	124.127.880	85,3	21.472.120
5.40201.02.01.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.870.000	18.561.996	88,9	2.308.004
5.40201.02.01.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	20.870.000	18.561.996	88,9	2.308.004
5.40201.02.01.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	200.000	26.591	13,3	173.409
5.40201.02.01.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	200.000	26.591	13,3	173.409
5.40201.02.01.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	149.124.000	143.208.050	96,0	5.915.950
5.40201.02.01.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	149.124.000	143.208.050	96,0	5.915.950
5.40201.02.01.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	25.800.000	4.218.745	16,4	21.581.255
5.40201.02.01.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	25.800.000	4.218.745	16,4	21.581.255
5.40201.02.01.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.900.000	12.656.185	98,1	243.815
5.40201.02.01.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.900.000	12.656.185	98,1	243.815
5.40201.02.01.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	25.200.000	0	0,0	25.200.000
5.40201.02.01.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	25.200.000	0	0,0	25.200.000
5.40201.02.01.1.01.02	BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN ASN	1.921.834.000	1.851.682.921	96,4	70.151.079
5.40201.02.01.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.921.834.000	1.851.682.921	96,4	70.151.079
5.40201.02.01.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.921.834.000	1.851.682.921	96,4	70.151.079
5.40201.02.01.1.01.06	BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DPRD SERTA KDH/WKDH	393.120.000	393.120.000	100,0	0
5.40201.02.01.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000	393.120.000	100,0	0
5.40201.02.01.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000	393.120.000	100,0	0
5.40201.02.02	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	169.240.000	152.036.800	89,8	17.203.200
5.40201.02.02.1	BELANJA OPERASI	169.240.000	152.036.800	89,8	17.203.200
5.40201.02.02.1.01	BELANJA PEGAWAI	162.540.000	145.640.000	89,6	16.900.000
5.40201.02.02.1.01.03	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA ASN	162.540.000	145.640.000	89,6	16.900.000
5.40201.02.02.1.01.03.07	Belanja Honorarium	162.540.000	145.640.000	89,6	16.900.000
5.40201.02.02.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	162.540.000	145.640.000	89,6	16.900.000
5.40201.02.02.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	6.700.000	6.396.800	95,5	303.200
5.40201.02.02.1.02.01	BELANJA BARANG	6.700.000	6.396.800	95,5	303.200
5.40201.02.02.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.700.000	6.396.800	95,5	303.200
5.40201.02.02.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.649.000	1.521.800	92,3	127.200
5.40201.02.02.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.976.000	2.944.000	98,9	32.000
5.40201.02.02.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.075.000	1.931.000	93,1	144.000
5.40201.02.03	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	35.000.000	32.445.500	92,7	2.554.500
5.40201.02.03.1	BELANJA OPERASI	35.000.000	32.445.500	92,7	2.554.500
5.40201.02.03.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000	32.445.500	92,7	2.554.500
5.40201.02.03.1.02.01	BELANJA BARANG	23.250.000	22.785.500	98,0	464.500
5.40201.02.03.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.250.000	22.785.500	98,0	464.500
5.40201.02.03.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	650.000	267.000	41,1	383.000
5.40201.02.03.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.364.000	3.363.500	100,0	500
5.40201.02.03.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	12.276.000	12.262.000	99,9	14.000
5.40201.02.03.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.960.000	6.893.000	99,0	67.000
5.40201.02.03.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	11.750.000	9.660.000	82,2	2.090.000
5.40201.02.03.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.750.000	9.660.000	82,2	2.090.000
5.40201.02.03.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.750.000	9.660.000	82,2	2.090.000
5.40201.02.04	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	5.000.000	4.889.000	97,8	111.000
5.40201.02.04.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	4.889.000	97,8	111.000
5.40201.02.04.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000	4.889.000	97,8	111.000
5.40201.02.04.1.02.01	BELANJA BARANG	5.000.000	4.889.000	97,8	111.000
5.40201.02.04.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000	4.889.000	97,8	111.000
5.40201.02.04.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.000	0	0,0	40.000
5.40201.02.04.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.960.000	4.889.000	98,6	71.000
5.40201.02.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	10.000.000	9.772.000	97,7	228.000

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH/ (KURANG)
			Rupiah	%	
5.40201.02.05.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	9.772.000	97,7	228.000
5.40201.02.05.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000	9.772.000	97,7	228.000
5.40201.02.05.1.02.01	BELANJA BARANG	10.000.000	9.772.000	97,7	228.000
5.40201.02.05.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000	9.772.000	97,7	228.000
5.40201.02.05.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	810.000	720.000	88,9	90.000
5.40201.02.05.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	6.200.000	6.092.000	98,3	108.000
5.40201.02.05.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.250.000	1.250.000	100,0	0
5.40201.02.05.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.740.000	1.710.000	98,3	30.000
5.40201.02.06	PENGLOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	5.000.000	4.860.000	97,2	140.000
5.40201.02.06.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	4.860.000	97,2	140.000
5.40201.02.06.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000	4.860.000	97,2	140.000
5.40201.02.06.1.02.01	BELANJA BARANG	5.000.000	4.860.000	97,2	140.000
5.40201.02.06.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000	4.860.000	97,2	140.000
5.40201.02.06.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.000	0	0,0	40.000
5.40201.02.06.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.960.000	4.860.000	98,0	100.000
5.40201.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	5.000.000	4.593.000	91,9	407.000
5.40201.02.07.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	4.593.000	91,9	407.000
5.40201.02.07.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000	4.593.000	91,9	407.000
5.40201.02.07.1.02.01	BELANJA BARANG	5.000.000	4.593.000	91,9	407.000
5.40201.02.07.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000	4.593.000	91,9	407.000
5.40201.02.07.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	350.000	69.000	19,7	281.000
5.40201.02.07.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.650.000	4.524.000	97,3	126.000
5.40201.02.08	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	5.000.000	4.496.000	89,9	504.000
5.40201.02.08.1	BELANJA OPERASI	5.000.000	4.496.000	89,9	504.000
5.40201.02.08.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000	4.496.000	89,9	504.000
5.40201.02.08.1.02.01	BELANJA BARANG	5.000.000	4.496.000	89,9	504.000
5.40201.02.08.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000	4.496.000	89,9	504.000
5.40201.02.08.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.116.000	2.768.000	88,8	348.000
5.40201.02.08.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.884.000	1.728.000	91,7	156.000
5.40201.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	24.889.000	24.202.200	97,2	686.800
5.40201.05.01	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	2.000.000	1.980.000	99,0	20.000
5.40201.05.01.1	BELANJA OPERASI	2.000.000	1.980.000	99,0	20.000
5.40201.05.01.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000	1.980.000	99,0	20.000
5.40201.05.01.1.02.01	BELANJA BARANG	2.000.000	1.980.000	99,0	20.000
5.40201.05.01.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000	1.980.000	99,0	20.000
5.40201.05.01.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.000	0	0,0	16.000
5.40201.05.01.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.984.000	1.980.000	99,8	4.000
5.40201.05.02	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	22.889.000	22.222.200	97,1	666.800
5.40201.05.02.1	BELANJA OPERASI	22.889.000	22.222.200	97,1	666.800
5.40201.05.02.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	22.889.000	22.222.200	97,1	666.800
5.40201.05.02.1.02.01	BELANJA BARANG	22.889.000	22.222.200	97,1	666.800
5.40201.05.02.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.889.000	22.222.200	97,1	666.800
5.40201.05.02.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.000	0	0,0	20.000
5.40201.05.02.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	22.869.000	22.222.200	97,2	646.800
5.40201.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.749.805.000	1.700.016.306	97,2	49.788.694
5.40201.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	40.000.000	39.744.500	99,4	255.500
5.40201.06.01.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	39.744.500	99,4	255.500
5.40201.06.01.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000	39.744.500	99,4	255.500
5.40201.06.01.1.02.01	BELANJA BARANG	40.000.000	39.744.500	99,4	255.500
5.40201.06.01.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000.000	39.744.500	99,4	255.500
5.40201.06.01.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	40.000.000	39.744.500	99,4	255.500
5.40201.06.02	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	56.900.000	56.077.375	98,6	822.625
5.40201.06.02.1	BELANJA OPERASI	46.360.000	45.777.375	98,7	582.625
5.40201.06.02.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	46.360.000	45.777.375	98,7	582.625
5.40201.06.02.1.02.01	BELANJA BARANG	46.360.000	45.777.375	98,7	582.625
5.40201.06.02.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	46.360.000	45.777.375	98,7	582.625
5.40201.06.02.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	35.080.000	34.756.465	99,1	323.535
5.40201.06.02.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.500.000	3.430.910	98,0	69.090
5.40201.06.02.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.780.000	7.590.000	97,6	190.000
5.40201.06.02.2	BELANJA MODAL	10.540.000	10.300.000	97,7	240.000
5.40201.06.02.2.02	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	10.540.000	10.300.000	97,7	240.000
5.40201.06.02.2.02.05	BELANJA MODAL ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	4.800.000	4.800.000	100,0	0
5.40201.06.02.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.800.000	4.800.000	100,0	0
5.40201.06.02.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.800.000	4.800.000	100,0	0
5.40201.06.02.2.02.10	BELANJA MODAL KOMPUTER	5.740.000	5.500.000	95,8	240.000
5.40201.06.02.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.740.000	5.500.000	95,8	240.000
5.40201.06.02.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.740.000	5.500.000	95,8	240.000
5.40201.06.03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	52.500.000	51.063.000	97,3	1.437.000
5.40201.06.03.1	BELANJA OPERASI	38.460.500	37.313.000	97,0	1.147.500
5.40201.06.03.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	38.460.500	37.313.000	97,0	1.147.500
5.40201.06.03.1.02.01	BELANJA BARANG	38.460.500	37.313.000	97,0	1.147.500
5.40201.06.03.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH/ (KURANG)
			Rupiah	%	
		38.460.500	37.313.000	97,0	1.147.500
5.40201.06.03.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.150.000	6.060.000	98,5	90.000
5.40201.06.03.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.672.000	3.525.000	96,0	147.000
5.40201.06.03.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	27.438.500	26.528.000	96,7	910.500
5.40201.06.03.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.200.000	1.200.000	100,0	0
5.40201.06.03.2	BELANJA MODAL	14.039.500	13.750.000	97,9	289.500
5.40201.06.03.2.02	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	14.039.500	13.750.000	97,9	289.500
5.40201.06.03.2.02.05	BELANJA MODAL ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	14.039.500	13.750.000	97,9	289.500
5.40201.06.03.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	14.039.500	13.750.000	97,9	289.500
5.40201.06.03.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	7.339.500	7.300.000	99,5	39.500
5.40201.06.03.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	6.700.000	6.450.000	96,3	250.000
5.40201.06.04	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	100.255.000	100.053.890	99,8	201.110
5.40201.06.04.1	BELANJA OPERASI	100.255.000	100.053.890	99,8	201.110
5.40201.06.04.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	100.255.000	100.053.890	99,8	201.110
5.40201.06.04.1.02.01	BELANJA BARANG	100.255.000	100.053.890	99,8	201.110
5.40201.06.04.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.255.000	100.053.890	99,8	201.110
5.40201.06.04.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	52.400	49.500	94,5	2.900
5.40201.06.04.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	34.832.600	34.707.390	99,6	125.210
5.40201.06.04.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	65.370.000	65.297.000	99,9	73.000
5.40201.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	40.000.000	39.367.370	98,4	632.630
5.40201.06.05.1	BELANJA OPERASI	40.000.000	39.367.370	98,4	632.630
5.40201.06.05.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000	39.367.370	98,4	632.630
5.40201.06.05.1.02.01	BELANJA BARANG	40.000.000	39.367.370	98,4	632.630
5.40201.06.05.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000.000	39.367.370	98,4	632.630
5.40201.06.05.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	173.000	172.000	99,4	1.000
5.40201.06.05.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	11.797.000	11.689.900	99,1	107.100
5.40201.06.05.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	18.750.000	18.283.590	97,5	466.410
5.40201.06.05.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.280.000	9.221.880	99,4	58.120
5.40201.06.08	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	58.150.000	57.813.690	99,4	336.310
5.40201.06.08.1	BELANJA OPERASI	58.150.000	57.813.690	99,4	336.310
5.40201.06.08.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	58.150.000	57.813.690	99,4	336.310
5.40201.06.08.1.02.01	BELANJA BARANG	58.150.000	57.813.690	99,4	336.310
5.40201.06.08.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	58.150.000	57.813.690	99,4	336.310
5.40201.06.08.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.600	0	0,0	11.600
5.40201.06.08.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	18.982.400	18.947.500	99,8	34.900
5.40201.06.08.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.156.000	38.866.190	99,3	289.810
5.40201.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.392.000.000	1.345.896.481	96,7	46.103.519
5.40201.06.09.1	BELANJA OPERASI	1.392.000.000	1.345.896.481	96,7	46.103.519
5.40201.06.09.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	1.392.000.000	1.345.896.481	96,7	46.103.519
5.40201.06.09.1.02.01	BELANJA BARANG	549.768.000	513.286.941	93,4	36.481.059
5.40201.06.09.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	549.768.000	513.286.941	93,4	36.481.059
5.40201.06.09.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	214.000	188.500	88,1	25.500
5.40201.06.09.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	8.680.000	8.562.540	98,7	117.460
5.40201.06.09.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.050.000	0	0,0	1.050.000
5.40201.06.09.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	539.824.000	504.535.901	93,5	35.288.099
5.40201.06.09.1.02.02	BELANJA JASA	517.840.000	517.535.500	99,9	304.500
5.40201.06.09.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	517.840.000	517.535.500	99,9	304.500
5.40201.06.09.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	7.840.000	7.535.500	96,1	304.500
5.40201.06.09.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	510.000.000	510.000.000	100,0	0
5.40201.06.09.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	324.392.000	315.074.040	97,1	9.317.960
5.40201.06.09.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	324.392.000	315.074.040	97,1	9.317.960
5.40201.06.09.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	324.392.000	315.074.040	97,1	9.317.960
5.40201.06.10	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	10.000.000	10.000.000	100,0	0
5.40201.06.10.2	BELANJA MODAL	10.000.000	10.000.000	100,0	0
5.40201.06.10.2.02	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	10.000.000	10.000.000	100,0	0
5.40201.06.10.2.02.05	BELANJA MODAL ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	10.000.000	10.000.000	100,0	0
5.40201.06.10.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	10.000.000	10.000.000	100,0	0
5.40201.06.10.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	10.000.000	10.000.000	100,0	0
5.40201.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100.000.000	98.491.800	98,5	1.508.200
5.40201.07.10	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	100.000.000	98.491.800	98,5	1.508.200
5.40201.07.10.1	BELANJA OPERASI	753.000	736.800	97,9	16.200
5.40201.07.10.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	753.000	736.800	97,9	16.200
5.40201.07.10.1.02.01	BELANJA BARANG	753.000	736.800	97,9	16.200
5.40201.07.10.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	753.000	736.800	97,9	16.200
5.40201.07.10.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	77.000	76.800	99,7	200
5.40201.07.10.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	676.000	660.000	97,6	16.000
5.40201.07.10.2	BELANJA MODAL	99.247.000	97.755.000	98,5	1.492.000
5.40201.07.10.2.02	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	99.247.000	97.755.000	98,5	1.492.000
5.40201.07.10.2.02.05	BELANJA MODAL ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	59.905.000	58.730.000	98,0	1.175.000
5.40201.07.10.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	30.985.000	29.975.000	96,7	1.010.000
5.40201.07.10.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	30.985.000	29.975.000	96,7	1.010.000
5.40201.07.10.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	28.920.000	28.755.000	99,4	165.000
5.40201.07.10.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	7.320.000	7.200.000	98,4	120.000
5.40201.07.10.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	21.600.000	21.555.000	99,8	45.000
5.40201.07.10.2.02.06	BELANJA MODAL ALAT STUDIO, KOMUNIKASI, DAN PEMANCAR	15.145.000	15.000.000	99,0	145.000
5.40201.07.10.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	15.145.000	15.000.000	99,0	145.000

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH/ (KURANG)
			Rupiah	%	
5.40201.07.10.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	15.145.000	15.000.000	99,0	145.000
5.40201.07.10.2.02.10	BELANJA MODAL KOMPUTER	24.197.000	24.025.000	99,3	172.000
5.40201.07.10.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	24.197.000	24.025.000	99,3	172.000
5.40201.07.10.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	24.197.000	24.025.000	99,3	172.000
5.40201.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.417.868.000	1.238.943.749	87,4	178.924.251
5.40201.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	30.000.000	29.681.000	98,9	319.000
5.40201.08.01.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	29.681.000	98,9	319.000
5.40201.08.01.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000	29.681.000	98,9	319.000
5.40201.08.01.1.02.01	BELANJA BARANG	2.600.000	2.546.000	97,9	54.000
5.40201.08.01.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.600.000	2.546.000	97,9	54.000
5.40201.08.01.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	208.000	206.000	99,0	2.000
5.40201.08.01.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.392.000	2.340.000	97,8	52.000
5.40201.08.01.1.02.02	BELANJA JASA	13.600.000	13.600.000	100,0	0
5.40201.08.01.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.600.000	13.600.000	100,0	0
5.40201.08.01.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	4.000.000	4.000.000	100,0	0
5.40201.08.01.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.600.000	9.600.000	100,0	0
5.40201.08.01.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	13.800.000	13.535.000	98,1	265.000
5.40201.08.01.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.800.000	13.535.000	98,1	265.000
5.40201.08.01.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.800.000	13.535.000	98,1	265.000
5.40201.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	332.308.000	275.482.749	82,9	56.825.251
5.40201.08.02.1	BELANJA OPERASI	332.308.000	275.482.749	82,9	56.825.251
5.40201.08.02.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	332.308.000	275.482.749	82,9	56.825.251
5.40201.08.02.1.02.01	BELANJA BARANG	8.000	0	0,0	8.000
5.40201.08.02.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.000	0	0,0	8.000
5.40201.08.02.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.000	0	0,0	8.000
5.40201.08.02.1.02.02	BELANJA JASA	332.300.000	275.482.749	82,9	56.817.251
5.40201.08.02.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	332.300.000	275.482.749	82,9	56.817.251
5.40201.08.02.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	15.400.000	2.266.037	14,7	13.133.963
5.40201.08.02.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	30.000.000	21.719.440	72,4	8.280.560
5.40201.08.02.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	254.000.000	226.837.272	89,3	27.162.728
5.40201.08.02.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	32.900.000	24.660.000	75,0	8.240.000
5.40201.08.03	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	131.620.000	128.480.000	97,6	3.140.000
5.40201.08.03.1	BELANJA OPERASI	131.620.000	128.480.000	97,6	3.140.000
5.40201.08.03.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	131.620.000	128.480.000	97,6	3.140.000
5.40201.08.03.1.02.01	BELANJA BARANG	131.620.000	128.480.000	97,6	3.140.000
5.40201.08.03.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	131.620.000	128.480.000	97,6	3.140.000
5.40201.08.03.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.000	0	0,0	20.000
5.40201.08.03.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	131.600.000	128.480.000	97,6	3.120.000
5.40201.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	923.940.000	805.300.000	87,2	118.640.000
5.40201.08.04.1	BELANJA OPERASI	923.940.000	805.300.000	87,2	118.640.000
5.40201.08.04.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	923.940.000	805.300.000	87,2	118.640.000
5.40201.08.04.1.02.02	BELANJA JASA	923.940.000	805.300.000	87,2	118.640.000
5.40201.08.04.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	923.940.000	805.300.000	87,2	118.640.000
5.40201.08.04.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	473.100.000	395.770.000	83,7	77.330.000
5.40201.08.04.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	195.840.000	167.790.000	85,7	28.050.000
5.40201.08.04.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	165.240.000	161.160.000	97,5	4.080.000
5.40201.08.04.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	89.760.000	80.580.000	89,8	9.180.000
5.40201.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.570.000.000	1.532.484.428	97,6	37.515.572
5.40201.09.01	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1.100.000.000	1.069.315.928	97,2	30.684.072
5.40201.09.01.1	BELANJA OPERASI	1.100.000.000	1.069.315.928	97,2	30.684.072
5.40201.09.01.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	1.100.000.000	1.069.315.928	97,2	30.684.072
5.40201.09.01.1.02.01	BELANJA BARANG	696.375.000	695.054.550	99,8	1.320.450
5.40201.09.01.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	696.375.000	695.054.550	99,8	1.320.450
5.40201.09.01.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	696.368.000	695.054.550	99,8	1.313.450
5.40201.09.01.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.000	0	0,0	7.000
5.40201.09.01.1.02.02	BELANJA JASA	73.000.000	44.053.900	60,4	28.946.100
5.40201.09.01.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	73.000.000	44.053.900	60,4	28.946.100
5.40201.09.01.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	73.000.000	44.053.900	60,4	28.946.100
5.40201.09.01.1.02.03	BELANJA PEMELIHARAAN	330.625.000	330.207.478	99,9	417.522
5.40201.09.01.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	330.625.000	330.207.478	99,9	417.522
5.40201.09.01.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	303.695.000	303.679.819	100,0	15.181
5.40201.09.01.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	26.930.000	26.527.659	98,5	402.341
5.40201.09.05	PEMELIHARAAN MEBEL	10.120.000	10.086.000	99,7	34.000
5.40201.09.05.1	BELANJA OPERASI	10.120.000	10.086.000	99,7	34.000
5.40201.09.05.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	10.120.000	10.086.000	99,7	34.000
5.40201.09.05.1.02.03	BELANJA PEMELIHARAAN	10.120.000	10.086.000	99,7	34.000
5.40201.09.05.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.120.000	10.086.000	99,7	34.000
5.40201.09.05.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	10.120.000	10.086.000	99,7	34.000
5.40201.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	70.000.000	68.877.000	98,4	1.123.000
5.40201.09.06.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	68.877.000	98,4	1.123.000
5.40201.09.06.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000	68.877.000	98,4	1.123.000

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH/ (KURANG)
			Rupiah	%	
5.40201.09.06.1.02.01	BELANJA BARANG	32.000	0	0,0	32.000
5.40201.09.06.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.000	0	0,0	32.000
5.40201.09.06.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	32.000	0	0,0	32.000
5.40201.09.06.1.02.03	BELANJA PEMELIHARAAN	69.968.000	68.877.000	98,4	1.091.000
5.40201.09.06.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	69.968.000	68.877.000	98,4	1.091.000
5.40201.09.06.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	15.088.000	15.000.000	99,4	88.000
5.40201.09.06.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	29.280.000	28.840.000	98,5	440.000
5.40201.09.06.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.870.000	13.617.000	98,2	253.000
5.40201.09.06.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	11.730.000	11.420.000	97,4	310.000
5.40201.09.09	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	220.000.000	216.798.000	98,5	3.202.000
5.40201.09.09.1	BELANJA OPERASI	220.000.000	216.798.000	98,5	3.202.000
5.40201.09.09.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	220.000.000	216.798.000	98,5	3.202.000
5.40201.09.09.1.02.02	BELANJA JASA	8.000.000	7.792.200	97,4	207.800
5.40201.09.09.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.000.000	7.792.200	97,4	207.800
5.40201.09.09.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	4.000.000	3.885.000	97,1	115.000
5.40201.09.09.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	4.000.000	3.907.200	97,7	92.800
5.40201.09.09.1.02.03	BELANJA PEMELIHARAAN	212.000.000	209.005.800	98,6	2.994.200
5.40201.09.09.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	212.000.000	209.005.800	98,6	2.994.200
5.40201.09.09.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	212.000.000	209.005.800	98,6	2.994.200
5.40201.09.11	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	169.880.000	167.407.500	98,5	2.472.500
5.40201.09.11.1	BELANJA OPERASI	86.925.000	85.827.500	98,7	1.097.500
5.40201.09.11.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	86.925.000	85.827.500	98,7	1.097.500
5.40201.09.11.1.02.01	BELANJA BARANG	433.000	428.000	98,9	5.000
5.40201.09.11.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	433.000	428.000	98,9	5.000
5.40201.09.11.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000	0	0,0	1.000
5.40201.09.11.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	432.000	428.000	99,1	4.000
5.40201.09.11.1.02.03	BELANJA PEMELIHARAAN	86.492.000	85.399.500	98,7	1.092.500
5.40201.09.11.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.495.000	35.505.000	97,3	990.000
5.40201.09.11.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	8.640.000	8.300.000	96,1	340.000
5.40201.09.11.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.225.000	6.215.000	99,8	10.000
5.40201.09.11.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	20.130.000	19.490.000	96,8	640.000
5.40201.09.11.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.500.000	1.500.000	100,0	0
5.40201.09.11.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49.997.000	49.894.500	99,8	102.500
5.40201.09.11.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	49.997.000	49.894.500	99,8	102.500
5.40201.09.11.2	BELANJA MODAL	82.955.000	81.580.000	98,3	1.375.000
5.40201.09.11.2.02	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	82.955.000	81.580.000	98,3	1.375.000
5.40201.09.11.2.02.05	BELANJA MODAL ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	82.955.000	81.580.000	98,3	1.375.000
5.40201.09.11.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	82.955.000	81.580.000	98,3	1.375.000
5.40201.09.11.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	82.955.000	81.580.000	98,3	1.375.000
5.40201.15	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	32.513.154.000	32.019.155.031	98,5	493.998.969
5.40201.15.01	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	32.507.154.000	32.019.155.031	98,5	487.998.969
5.40201.15.01.1	BELANJA OPERASI	32.507.154.000	32.019.155.031	98,5	487.998.969
5.40201.15.01.1.01	BELANJA PEGAWAI	32.507.154.000	32.019.155.031	98,5	487.998.969
5.40201.15.01.1.01.04	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN DPRD	32.507.154.000	32.019.155.031	98,5	487.998.969
5.40201.15.01.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.960.000	1.110.165.000	99,6	4.795.000
5.40201.15.01.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.960.000	1.110.165.000	99,6	4.795.000
5.40201.15.01.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	125.412.000	123.129.300	98,2	2.282.700
5.40201.15.01.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	125.412.000	123.129.300	98,2	2.282.700
5.40201.15.01.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	138.330.000	136.439.280	98,6	1.890.720
5.40201.15.01.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	138.330.000	136.439.280	98,6	1.890.720
5.40201.15.01.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.640.000	95.098.500	99,4	541.500
5.40201.15.01.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	95.640.000	95.098.500	99,4	541.500
5.40201.15.01.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.616.650.000	1.609.739.250	99,6	6.910.750
5.40201.15.01.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.616.650.000	1.609.739.250	99,6	6.910.750
5.40201.15.01.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	133.272.000	132.685.875	99,6	586.125
5.40201.15.01.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	133.272.000	132.685.875	99,6	586.125
5.40201.15.01.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20.332.000	9.713.550	47,8	10.618.450
5.40201.15.01.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20.332.000	9.713.550	47,8	10.618.450
5.40201.15.01.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000	8.775.900.000	99,5	44.100.000
5.40201.15.01.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000	8.775.900.000	99,5	44.100.000
5.40201.15.01.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000	2.190.300.000	99,3	14.700.000
5.40201.15.01.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000	2.190.300.000	99,3	14.700.000
5.40201.15.01.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	780.000	397.464	51,0	382.536
5.40201.15.01.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	780.000	397.464	51,0	382.536
5.40201.15.01.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	98.000	32.846	33,5	65.154
5.40201.15.01.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	98.000	32.846	33,5	65.154
5.40201.15.01.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	10.874.730.000	10.611.603.966	97,6	263.126.034
5.40201.15.01.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	99.000.000	97.404.510	98,4	1.595.490
5.40201.15.01.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.700.000	2.282.364	84,5	417.636

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH/ (KURANG)
			Rupiah	%	
5.40201.15.01.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.990.000	6.847.092	98,0	142.908
5.40201.15.01.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	10.766.040.000	10.505.070.000	97,6	260.970.000
5.40201.15.01.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.346.200.000	7.208.200.000	98,1	138.000.000
5.40201.15.01.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.346.200.000	7.208.200.000	98,1	138.000.000
5.40201.15.01.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	15.750.000	15.750.000	100,0	0
5.40201.15.01.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	15.750.000	15.750.000	100,0	0
5.40201.15.02	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	4.500.000	0	0,0	4.500.000
5.40201.15.02.1	BELANJA OPERASI	4.500.000	0	0,0	4.500.000
5.40201.15.02.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000	0	0,0	4.500.000
5.40201.15.02.1.02.01	BELANJA BARANG	4.500.000	0	0,0	4.500.000
5.40201.15.02.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.500.000	0	0,0	4.500.000
5.40201.15.02.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4.500.000	0	0,0	4.500.000
5.40201.15.03	PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	1.500.000	0	0,0	1.500.000
5.40201.15.03.1	BELANJA OPERASI	1.500.000	0	0,0	1.500.000
5.40201.15.03.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000	0	0,0	1.500.000
5.40201.15.03.1.02.01	BELANJA BARANG	100.000	0	0,0	100.000
5.40201.15.03.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000	0	0,0	100.000
5.40201.15.03.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	100.000	0	0,0	100.000
5.40201.15.03.1.02.02	BELANJA JASA	1.400.000	0	0,0	1.400.000
5.40201.15.03.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.400.000	0	0,0	1.400.000
5.40201.15.03.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	1.400.000	0	0,0	1.400.000
5.40202	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	26.023.243.000	24.319.860.184	93,5	1.703.382.816
5.40202.01	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	8.591.201.000	8.214.241.125	95,6	376.959.875
5.40202.01.01	PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	648.351.000	575.602.500	88,8	72.748.500
5.40202.01.01.1	BELANJA OPERASI	648.351.000	575.602.500	88,8	72.748.500
5.40202.01.01.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	648.351.000	575.602.500	88,8	72.748.500
5.40202.01.01.1.02.01	BELANJA BARANG	3.895.000	3.447.000	88,5	448.000
5.40202.01.01.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.895.000	3.447.000	88,5	448.000
5.40202.01.01.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	741.000	663.000	89,5	78.000
5.40202.01.01.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.480.000	2.280.000	91,9	200.000
5.40202.01.01.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	674.000	504.000	74,8	170.000
5.40202.01.01.1.02.02	BELANJA JASA	4.800.000	2.892.500	60,3	1.907.500
5.40202.01.01.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.800.000	2.892.500	60,3	1.907.500
5.40202.01.01.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	4.800.000	2.892.500	60,3	1.907.500
5.40202.01.01.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	639.656.000	569.263.000	89,0	70.393.000
5.40202.01.01.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	639.656.000	569.263.000	89,0	70.393.000
5.40202.01.01.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	639.656.000	569.263.000	89,0	70.393.000
5.40202.01.02	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	1.377.000.000	1.136.667.050	82,6	240.332.950
5.40202.01.02.1	BELANJA OPERASI	1.377.000.000	1.136.667.050	82,6	240.332.950
5.40202.01.02.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	1.377.000.000	1.136.667.050	82,6	240.332.950
5.40202.01.02.1.02.01	BELANJA BARANG	23.118.000	18.270.450	79,0	4.847.550
5.40202.01.02.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.118.000	18.270.450	79,0	4.847.550
5.40202.01.02.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.478.000	1.190.200	80,5	287.800
5.40202.01.02.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.790.000	2.574.000	92,3	216.000
5.40202.01.02.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	17.400.000	13.286.250	76,4	4.113.750
5.40202.01.02.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.450.000	1.220.000	84,1	230.000
5.40202.01.02.1.02.02	BELANJA JASA	21.840.000	20.471.000	93,7	1.369.000
5.40202.01.02.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	21.840.000	20.471.000	93,7	1.369.000
5.40202.01.02.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	21.840.000	20.471.000	93,7	1.369.000
5.40202.01.02.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	1.332.042.000	1.097.925.600	82,4	234.116.400
5.40202.01.02.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.332.042.000	1.097.925.600	82,4	234.116.400
5.40202.01.02.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.332.042.000	1.097.925.600	82,4	234.116.400
5.40202.01.03	PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.140.000.000	6.088.505.700	99,2	51.494.300
5.40202.01.03.1	BELANJA OPERASI	6.140.000.000	6.088.505.700	99,2	51.494.300
5.40202.01.03.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	6.140.000.000	6.088.505.700	99,2	51.494.300
5.40202.01.03.1.02.01	BELANJA BARANG	2.472.000	2.106.200	85,2	365.800
5.40202.01.03.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.472.000	2.106.200	85,2	365.800
5.40202.01.03.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	696.000	564.200	81,1	131.800
5.40202.01.03.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	992.000	912.000	91,9	80.000
5.40202.01.03.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	400.000	400.000	100,0	0
5.40202.01.03.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	384.000	230.000	59,9	154.000
5.40202.01.03.1.02.02	BELANJA JASA	4.281.100.000	4.261.669.500	99,6	19.430.500
5.40202.01.03.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.281.100.000	4.261.669.500	99,6	19.430.500
5.40202.01.03.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	13.100.000	10.169.500	77,6	2.930.500
5.40202.01.03.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	4.268.000.000	4.251.500.000	99,6	16.500.000
5.40202.01.03.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	1.856.428.000	1.824.730.000	98,3	31.698.000
5.40202.01.03.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.856.428.000	1.824.730.000	98,3	31.698.000
5.40202.01.03.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.856.428.000	1.824.730.000	98,3	31.698.000
5.40202.01.04	FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK	400.850.000	395.039.875	98,6	5.810.125
5.40202.01.04.1	BELANJA OPERASI	400.850.000	395.039.875	98,6	5.810.125
5.40202.01.04.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	400.850.000	395.039.875	98,6	5.810.125
5.40202.01.04.1.02.01	BELANJA BARANG	850.000	754.000	88,7	96.000
5.40202.01.04.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	850.000	754.000	88,7	96.000
5.40202.01.04.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	44.000	0	0,0	44.000
5.40202.01.04.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	806.000	754.000	93,6	52.000

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH/ (KURANG)
			Rupiah	%	
5.40202.01.04.1.02.02	BELANJA JASA	400.000.000	394.285.875	98,6	5.714.125
5.40202.01.04.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	400.000.000	394.285.875	98,6	5.714.125
5.40202.01.04.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	400.000.000	394.285.875	98,6	5.714.125
5.40202.01.05	PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD	25.000.000	18.426.000	73,7	6.574.000
5.40202.01.05.1	BELANJA OPERASI	25.000.000	18.426.000	73,7	6.574.000
5.40202.01.05.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000	18.426.000	73,7	6.574.000
5.40202.01.05.1.02.01	BELANJA BARANG	25.000.000	18.426.000	73,7	6.574.000
5.40202.01.05.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.000.000	18.426.000	73,7	6.574.000
5.40202.01.05.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	25.000.000	18.426.000	73,7	6.574.000
5.40202.02	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	1.335.328.000	1.241.188.500	93,0	94.139.500
5.40202.02.01	PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	336.134.000	334.545.700	99,5	1.588.300
5.40202.02.01.1	BELANJA OPERASI	336.134.000	334.545.700	99,5	1.588.300
5.40202.02.01.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	336.134.000	334.545.700	99,5	1.588.300
5.40202.02.01.1.02.01	BELANJA BARANG	5.531.000	5.412.000	97,9	119.000
5.40202.02.01.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.531.000	5.412.000	97,9	119.000
5.40202.02.01.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.317.000	1.301.000	98,8	16.000
5.40202.02.01.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.984.000	1.961.000	98,8	23.000
5.40202.02.01.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000	200.000	100,0	0
5.40202.02.01.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.030.000	1.950.000	96,1	80.000
5.40202.02.01.1.02.02	BELANJA JASA	2.920.000	2.791.500	95,6	128.500
5.40202.02.01.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.920.000	2.791.500	95,6	128.500
5.40202.02.01.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	2.920.000	2.791.500	95,6	128.500
5.40202.02.01.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	327.683.000	326.342.200	99,6	1.340.800
5.40202.02.01.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	327.683.000	326.342.200	99,6	1.340.800
5.40202.02.01.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	327.683.000	326.342.200	99,6	1.340.800
5.40202.02.02	PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	172.620.000	170.327.400	98,7	2.292.600
5.40202.02.02.1	BELANJA OPERASI	172.620.000	170.327.400	98,7	2.292.600
5.40202.02.02.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	172.620.000	170.327.400	98,7	2.292.600
5.40202.02.02.1.02.01	BELANJA BARANG	6.280.000	5.980.000	95,2	300.000
5.40202.02.02.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.280.000	5.980.000	95,2	300.000
5.40202.02.02.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.601.000	1.512.000	94,4	89.000
5.40202.02.02.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.844.000	3.738.000	97,2	106.000
5.40202.02.02.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	400.000	400.000	100,0	0
5.40202.02.02.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	435.000	330.000	75,9	105.000
5.40202.02.02.1.02.02	BELANJA JASA	1.200.000	627.000	52,3	573.000
5.40202.02.02.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000	627.000	52,3	573.000
5.40202.02.02.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	1.200.000	627.000	52,3	573.000
5.40202.02.02.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	165.140.000	163.720.400	99,1	1.419.600
5.40202.02.02.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	165.140.000	163.720.400	99,1	1.419.600
5.40202.02.02.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	165.140.000	163.720.400	99,1	1.419.600
5.40202.02.03	PEMBAHASAN APBD	130.000.000	126.637.500	97,4	3.362.500
5.40202.02.03.1	BELANJA OPERASI	130.000.000	126.637.500	97,4	3.362.500
5.40202.02.03.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	130.000.000	126.637.500	97,4	3.362.500
5.40202.02.03.1.02.01	BELANJA BARANG	1.450.000	1.430.500	98,7	19.500
5.40202.02.03.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.450.000	1.430.500	98,7	19.500
5.40202.02.03.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	520.000	512.500	98,6	7.500
5.40202.02.03.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	930.000	918.000	98,7	12.000
5.40202.02.03.1.02.02	BELANJA JASA	3.400.000	3.235.000	95,2	165.000
5.40202.02.03.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.400.000	3.235.000	95,2	165.000
5.40202.02.03.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	3.400.000	3.235.000	95,2	165.000
5.40202.02.03.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	125.150.000	121.972.000	97,5	3.178.000
5.40202.02.03.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	125.150.000	121.972.000	97,5	3.178.000
5.40202.02.03.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	125.150.000	121.972.000	97,5	3.178.000
5.40202.02.04	PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN	345.294.000	266.749.100	77,3	78.544.900
5.40202.02.04.1	BELANJA OPERASI	345.294.000	266.749.100	77,3	78.544.900
5.40202.02.04.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	345.294.000	266.749.100	77,3	78.544.900
5.40202.02.04.1.02.01	BELANJA BARANG	10.698.000	9.537.000	89,2	1.161.000
5.40202.02.04.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.698.000	9.537.000	89,2	1.161.000
5.40202.02.04.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	839.000	832.000	99,2	7.000
5.40202.02.04.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.674.000	1.620.000	96,8	54.000
5.40202.02.04.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7.500.000	6.500.000	86,7	1.000.000
5.40202.02.04.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	250.000	250.000	100,0	0
5.40202.02.04.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	435.000	335.000	77,0	100.000
5.40202.02.04.1.02.02	BELANJA JASA	2.000.000	1.835.500	91,8	164.500
5.40202.02.04.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000	1.835.500	91,8	164.500
5.40202.02.04.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	2.000.000	1.835.500	91,8	164.500
5.40202.02.04.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	332.596.000	255.376.600	76,8	77.219.400
5.40202.02.04.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	332.596.000	255.376.600	76,8	77.219.400
5.40202.02.04.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	332.596.000	255.376.600	76,8	77.219.400
5.40202.02.06	PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	351.280.000	342.928.800	97,6	8.351.200
5.40202.02.06.1	BELANJA OPERASI	346.480.000	338.958.800	97,8	7.521.200
5.40202.02.06.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	346.480.000	338.958.800	97,8	7.521.200
5.40202.02.06.1.02.01	BELANJA BARANG	10.406.000	9.449.000	90,8	957.000
5.40202.02.06.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.406.000	9.449.000	90,8	957.000
5.40202.02.06.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.534.000	1.178.000	76,8	356.000
5.40202.02.06.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.712.000	4.682.000	99,4	30.000
5.40202.02.06.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.000.000	2.580.000	86,0	420.000
5.40202.02.06.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.160.000	1.009.000	87,0	151.000
5.40202.02.06.1.02.02	BELANJA JASA	1.600.000	1.303.000	81,4	297.000
5.40202.02.06.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.600.000	1.303.000	81,4	297.000

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH/ (KURANG)
			Rupiah	%	
5.40202.02.06.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	1.600.000	1.303.000	81,4	297.000
5.40202.02.06.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	334.474.000	328.206.800	98,1	6.267.200
5.40202.02.06.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	334.474.000	328.206.800	98,1	6.267.200
5.40202.02.06.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	334.474.000	328.206.800	98,1	6.267.200
5.40202.02.06.2	BELANJA MODAL	4.800.000	3.970.000	82,7	830.000
5.40202.02.06.2.02	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	4.800.000	3.970.000	82,7	830.000
5.40202.02.06.2.02.05	BELANJA MODAL ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	4.800.000	3.970.000	82,7	830.000
5.40202.02.06.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.800.000	3.970.000	82,7	830.000
5.40202.02.06.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.800.000	3.970.000	82,7	830.000
5.40202.03	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	4.586.729.000	3.935.732.180	85,8	650.996.820
5.40202.03.01	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	1.175.000.000	1.034.804.960	88,1	140.195.040
5.40202.03.01.1	BELANJA OPERASI	1.175.000.000	1.034.804.960	88,1	140.195.040
5.40202.03.01.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	1.175.000.000	1.034.804.960	88,1	140.195.040
5.40202.03.01.1.02.01	BELANJA BARANG	21.892.400	20.496.560	93,6	1.395.840
5.40202.03.01.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.892.400	20.496.560	93,6	1.395.840
5.40202.03.01.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.546.400	4.430.980	97,5	115.420
5.40202.03.01.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.976.000	2.936.540	98,7	39.460
5.40202.03.01.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10.800.000	9.728.000	90,1	1.072.000
5.40202.03.01.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.570.000	3.401.040	95,3	168.960
5.40202.03.01.1.02.02	BELANJA JASA	9.200.000	7.591.000	82,5	1.609.000
5.40202.03.01.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.200.000	7.591.000	82,5	1.609.000
5.40202.03.01.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	9.200.000	7.591.000	82,5	1.609.000
5.40202.03.01.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	1.143.907.600	1.006.717.400	88,0	137.190.200
5.40202.03.01.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.143.907.600	1.006.717.400	88,0	137.190.200
5.40202.03.01.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.101.123.600	964.142.400	87,6	136.981.200
5.40202.03.01.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.784.000	42.575.000	99,5	209.000
5.40202.03.02	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR	1.142.500.000	1.009.214.240	88,3	133.285.760
5.40202.03.02.1	BELANJA OPERASI	1.142.500.000	1.009.214.240	88,3	133.285.760
5.40202.03.02.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	1.142.500.000	1.009.214.240	88,3	133.285.760
5.40202.03.02.1.02.01	BELANJA BARANG	24.818.800	23.655.040	95,3	1.163.760
5.40202.03.02.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.818.800	23.655.040	95,3	1.163.760
5.40202.03.02.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.786.800	4.784.500	100,0	2.300
5.40202.03.02.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.216.000	4.142.000	98,2	74.000
5.40202.03.02.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10.800.000	9.728.000	90,1	1.072.000
5.40202.03.02.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.016.000	5.000.540	99,7	15.460
5.40202.03.02.1.02.02	BELANJA JASA	9.800.000	5.531.000	56,4	4.269.000
5.40202.03.02.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.800.000	5.531.000	56,4	4.269.000
5.40202.03.02.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	9.800.000	5.531.000	56,4	4.269.000
5.40202.03.02.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	1.107.881.200	980.028.200	88,5	127.853.000
5.40202.03.02.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.107.881.200	980.028.200	88,5	127.853.000
5.40202.03.02.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.063.345.200	935.678.200	88,0	127.667.000
5.40202.03.02.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	44.536.000	44.350.000	99,6	186.000
5.40202.03.03	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.149.000.000	946.441.980	82,4	202.558.020
5.40202.03.03.1	BELANJA OPERASI	1.149.000.000	946.441.980	82,4	202.558.020
5.40202.03.03.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	1.149.000.000	946.441.980	82,4	202.558.020
5.40202.03.03.1.02.01	BELANJA BARANG	20.485.700	18.842.980	92,0	1.642.720
5.40202.03.03.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.485.700	18.842.980	92,0	1.642.720
5.40202.03.03.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.961.700	2.517.480	85,0	444.220
5.40202.03.03.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.216.000	4.139.960	98,2	76.040
5.40202.03.03.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10.800.000	9.728.000	90,1	1.072.000
5.40202.03.03.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.508.000	2.457.540	98,0	50.460
5.40202.03.03.1.02.02	BELANJA JASA	9.300.000	6.092.000	65,5	3.208.000
5.40202.03.03.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.300.000	6.092.000	65,5	3.208.000
5.40202.03.03.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	9.300.000	6.092.000	65,5	3.208.000
5.40202.03.03.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	1.119.214.300	921.507.000	82,3	197.707.300
5.40202.03.03.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.119.214.300	921.507.000	82,3	197.707.300
5.40202.03.03.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.072.654.300	874.982.000	81,6	197.672.300
5.40202.03.03.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.560.000	46.525.000	99,9	35.000
5.40202.03.04	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN	1.105.500.000	932.412.000	84,3	173.088.000
5.40202.03.04.1	BELANJA OPERASI	1.105.500.000	932.412.000	84,3	173.088.000
5.40202.03.04.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	1.105.500.000	932.412.000	84,3	173.088.000
5.40202.03.04.1.02.01	BELANJA BARANG	18.255.800	16.217.000	88,8	2.038.800
5.40202.03.04.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.255.800	16.217.000	88,8	2.038.800
5.40202.03.04.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.336.800	1.674.000	71,6	662.800
5.40202.03.04.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.720.000	3.618.000	97,3	102.000
5.40202.03.04.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10.800.000	9.728.000	90,1	1.072.000
5.40202.03.04.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.399.000	1.197.000	85,6	202.000
5.40202.03.04.1.02.02	BELANJA JASA	9.400.000	6.342.000	67,5	3.058.000
5.40202.03.04.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.400.000	6.342.000	67,5	3.058.000
5.40202.03.04.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	9.400.000	6.342.000	67,5	3.058.000
5.40202.03.04.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	1.077.844.200	909.853.000	84,4	167.991.200
5.40202.03.04.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.077.844.200	909.853.000	84,4	167.991.200
5.40202.03.04.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.043.284.200	875.403.000	83,9	167.881.200
5.40202.03.04.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.560.000	34.450.000	99,7	110.000
5.40202.03.08	PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH	14.729.000	12.859.000	87,3	1.870.000
5.40202.03.08.1	BELANJA OPERASI	14.729.000	12.859.000	87,3	1.870.000

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH/ (KURANG)
			Rupiah	%	
5.40202.03.08.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	14.729.000	12.859.000	87,3	1.870.000
5.40202.03.08.1.02.01	BELANJA BARANG	3.169.000	2.580.000	81,4	589.000
5.40202.03.08.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.169.000	2.580.000	81,4	589.000
5.40202.03.08.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	169.000	0	0,0	169.000
5.40202.03.08.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.000.000	2.580.000	86,0	420.000
5.40202.03.08.1.02.02	BELANJA JASA	100.000	79.000	79,0	21.000
5.40202.03.08.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	100.000	79.000	79,0	21.000
5.40202.03.08.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	100.000	79.000	79,0	21.000
5.40202.03.08.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	11.460.000	10.200.000	89,0	1.260.000
5.40202.03.08.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.460.000	10.200.000	89,0	1.260.000
5.40202.03.08.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.460.000	10.200.000	89,0	1.260.000
5.40202.04	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	5.152.385.000	4.983.444.829	96,7	168.940.171
5.40202.04.02	PENDALAMAN TUGAS DPRD	2.370.000.000	2.224.255.500	93,9	145.744.500
5.40202.04.02.1	BELANJA OPERASI	2.370.000.000	2.224.255.500	93,9	145.744.500
5.40202.04.02.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	2.370.000.000	2.224.255.500	93,9	145.744.500
5.40202.04.02.1.02.01	BELANJA BARANG	960.000	850.000	88,5	110.000
5.40202.04.02.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	960.000	850.000	88,5	110.000
5.40202.04.02.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	216.000	166.000	76,9	50.000
5.40202.04.02.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	744.000	684.000	91,9	60.000
5.40202.04.02.1.02.02	BELANJA JASA	1.622.270.000	1.530.477.500	94,3	91.792.500
5.40202.04.02.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.622.270.000	1.530.477.500	94,3	91.792.500
5.40202.04.02.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	16.270.000	15.477.500	95,1	792.500
5.40202.04.02.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	1.606.000.000	1.515.000.000	94,3	91.000.000
5.40202.04.02.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	746.770.000	692.928.000	92,8	53.842.000
5.40202.04.02.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	746.770.000	692.928.000	92,8	53.842.000
5.40202.04.02.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	746.770.000	692.928.000	92,8	53.842.000
5.40202.04.03	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	2.142.385.000	2.119.586.329	98,9	22.798.671
5.40202.04.03.1	BELANJA OPERASI	2.142.385.000	2.119.586.329	98,9	22.798.671
5.40202.04.03.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	2.142.385.000	2.119.586.329	98,9	22.798.671
5.40202.04.03.1.02.01	BELANJA BARANG	201.485.000	192.986.250	95,8	8.498.750
5.40202.04.03.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	201.485.000	192.986.250	95,8	8.498.750
5.40202.04.03.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	469.000	343.500	73,2	125.500
5.40202.04.03.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	744.000	648.000	87,1	96.000
5.40202.04.03.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	199.500.000	191.391.750	95,9	8.108.250
5.40202.04.03.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	772.000	603.000	78,1	169.000
5.40202.04.03.1.02.02	BELANJA JASA	1.937.900.000	1.924.200.079	99,3	13.699.921
5.40202.04.03.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.937.900.000	1.924.200.079	99,3	13.699.921
5.40202.04.03.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	63.600.000	53.300.000	83,8	10.300.000
5.40202.04.03.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.874.300.000	1.870.900.079	99,8	3.399.921
5.40202.04.03.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	3.000.000	2.400.000	80,0	600.000
5.40202.04.03.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000	2.400.000	80,0	600.000
5.40202.04.03.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	2.400.000	80,0	600.000
5.40202.04.04	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	240.000.000	240.000.000	100,0	0
5.40202.04.04.1	BELANJA OPERASI	240.000.000	240.000.000	100,0	0
5.40202.04.04.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	240.000.000	240.000.000	100,0	0
5.40202.04.04.1.02.02	BELANJA JASA	240.000.000	240.000.000	100,0	0
5.40202.04.04.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	240.000.000	240.000.000	100,0	0
5.40202.04.04.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	240.000.000	240.000.000	100,0	0
5.40202.04.05	PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	384.000.000	384.000.000	100,0	0
5.40202.04.05.1	BELANJA OPERASI	384.000.000	384.000.000	100,0	0
5.40202.04.05.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	384.000.000	384.000.000	100,0	0
5.40202.04.05.1.02.02	BELANJA JASA	384.000.000	384.000.000	100,0	0
5.40202.04.05.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	384.000.000	384.000.000	100,0	0
5.40202.04.05.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	384.000.000	384.000.000	100,0	0
5.40202.04.07	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD	16.000.000	15.603.000	97,5	397.000
5.40202.04.07.1	BELANJA OPERASI	16.000.000	15.603.000	97,5	397.000
5.40202.04.07.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000	15.603.000	97,5	397.000
5.40202.04.07.1.02.01	BELANJA BARANG	16.000.000	15.603.000	97,5	397.000
5.40202.04.07.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.000.000	15.603.000	97,5	397.000
5.40202.04.07.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	568.000	422.000	74,3	146.000
5.40202.04.07.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	9.432.000	9.231.000	97,9	201.000
5.40202.04.07.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6.000.000	5.950.000	99,2	50.000
5.40202.05	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	3.102.600.000	3.000.528.200	96,7	102.071.800
5.40202.05.01	KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH	8.500.000	7.060.200	83,1	1.439.800
5.40202.05.01.1	BELANJA OPERASI	8.500.000	7.060.200	83,1	1.439.800
5.40202.05.01.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000	7.060.200	83,1	1.439.800
5.40202.05.01.1.02.01	BELANJA BARANG	103.200	0	0,0	103.200
5.40202.05.01.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	103.200	0	0,0	103.200
5.40202.05.01.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	103.200	0	0,0	103.200
5.40202.05.01.1.02.02	BELANJA JASA	1.000.000	840.000	84,0	160.000
5.40202.05.01.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000	840.000	84,0	160.000
5.40202.05.01.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.000.000	840.000	84,0	160.000
5.40202.05.01.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	7.396.800	6.220.200	84,1	1.176.600
5.40202.05.01.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.396.800	6.220.200	84,1	1.176.600
5.40202.05.01.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	750.000	0	0,0	750.000
5.40202.05.01.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.646.800	6.220.200	93,6	426.600
5.40202.05.02	PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	39.100.000	37.165.500	95,1	1.934.500
5.40202.05.02.1	BELANJA OPERASI	39.100.000	37.165.500	95,1	1.934.500

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH/ (KURANG)
			Rupiah	%	
5.40202.05.02.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	39.100.000	37.165.500	95,1	1.934.500
5.40202.05.02.1.02.01	BELANJA BARANG	11.515.200	10.266.500	89,2	1.248.700
5.40202.05.02.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.515.200	10.266.500	89,2	1.248.700
5.40202.05.02.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.451.200	825.000	56,9	626.200
5.40202.05.02.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	930.000	901.000	96,9	29.000
5.40202.05.02.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.750.000	3.250.000	86,7	500.000
5.40202.05.02.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.409.000	1.380.000	97,9	29.000
5.40202.05.02.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.975.000	3.910.500	98,4	64.500
5.40202.05.02.1.02.02	BELANJA JASA	2.500.000	1.933.000	77,3	567.000
5.40202.05.02.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.500.000	1.933.000	77,3	567.000
5.40202.05.02.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.500.000	1.400.000	93,3	100.000
5.40202.05.02.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	1.000.000	533.000	53,3	467.000
5.40202.05.02.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	25.084.800	24.966.000	99,5	118.800
5.40202.05.02.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.084.800	24.966.000	99,5	118.800
5.40202.05.02.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.084.800	24.966.000	99,5	118.800
5.40202.05.03	PELAKSANAAN RESES	3.055.000.000	2.956.302.500	96,8	98.697.500
5.40202.05.03.1	BELANJA OPERASI	3.055.000.000	2.956.302.500	96,8	98.697.500
5.40202.05.03.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	3.055.000.000	2.956.302.500	96,8	98.697.500
5.40202.05.03.1.02.01	BELANJA BARANG	2.041.216.000	2.013.382.500	98,6	27.833.500
5.40202.05.03.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.041.216.000	2.013.382.500	98,6	27.833.500
5.40202.05.03.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.899.000	9.539.000	87,5	1.360.000
5.40202.05.03.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	24.140.000	21.966.500	91,0	2.173.500
5.40202.05.03.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	65.070.000	59.684.000	91,7	5.386.000
5.40202.05.03.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.150.000	3.100.000	98,4	50.000
5.40202.05.03.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	29.957.000	23.813.000	79,5	6.144.000
5.40202.05.03.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.908.000.000	1.895.280.000	99,3	12.720.000
5.40202.05.03.1.02.02	BELANJA JASA	855.442.000	821.370.000	96,0	34.072.000
5.40202.05.03.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.142.000	0	0,0	2.142.000
5.40202.05.03.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	2.142.000	0	0,0	2.142.000
5.40202.05.03.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	696.700.000	668.970.000	96,0	27.730.000
5.40202.05.03.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.000.000	0	0,0	1.000.000
5.40202.05.03.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	234.000.000	218.520.000	93,4	15.480.000
5.40202.05.03.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	124.200.000	115.200.000	92,8	9.000.000
5.40202.05.03.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	337.500.000	335.250.000	99,3	2.250.000
5.40202.05.03.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	156.600.000	152.400.000	97,3	4.200.000
5.40202.05.03.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	156.600.000	152.400.000	97,3	4.200.000
5.40202.05.03.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	158.342.000	121.550.000	76,8	36.792.000
5.40202.05.03.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	158.342.000	121.550.000	76,8	36.792.000
5.40202.05.03.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	158.342.000	121.550.000	76,8	36.792.000
5.40202.06	PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	395.000.000	365.050.000	92,4	29.950.000
5.40202.06.02	PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	395.000.000	365.050.000	92,4	29.950.000
5.40202.06.02.1	BELANJA OPERASI	395.000.000	365.050.000	92,4	29.950.000
5.40202.06.02.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	395.000.000	365.050.000	92,4	29.950.000
5.40202.06.02.1.02.01	BELANJA BARANG	7.271.200	6.121.000	84,2	1.150.200
5.40202.06.02.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.271.200	6.121.000	84,2	1.150.200
5.40202.06.02.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.206.200	1.941.000	88,0	265.200
5.40202.06.02.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.860.000	1.840.000	98,9	20.000
5.40202.06.02.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.900.000	1.400.000	73,7	500.000
5.40202.06.02.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.305.000	940.000	72,0	365.000
5.40202.06.02.1.02.02	BELANJA JASA	5.100.000	5.046.000	98,9	54.000
5.40202.06.02.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.100.000	5.046.000	98,9	54.000
5.40202.06.02.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	5.100.000	5.046.000	98,9	54.000
5.40202.06.02.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	5.100.000	5.046.000	98,9	54.000
5.40202.06.02.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	382.628.800	353.883.000	92,5	28.745.800
5.40202.06.02.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	382.628.800	353.883.000	92,5	28.745.800
5.40202.06.02.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	382.628.800	353.883.000	92,5	28.745.800
5.40202.06.02.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	382.628.800	353.883.000	92,5	28.745.800
5.40202.06.02.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	382.628.800	353.883.000	92,5	28.745.800
5.40202.06.02.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	382.628.800	353.883.000	92,5	28.745.800
5.40202.08	FASILITASI TUGAS DPRD	2.860.000.000	2.579.675.350	90,2	280.324.650
5.40202.08	FASILITASI TUGAS DPRD	2.860.000.000	2.579.675.350	90,2	280.324.650
5.40202.08.02	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DPRD	120.000.000	98.775.200	82,3	21.224.800
5.40202.08.02	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DPRD	120.000.000	98.775.200	82,3	21.224.800
5.40202.08.02.1	BELANJA OPERASI	120.000.000	98.775.200	82,3	21.224.800
5.40202.08.02.1	BELANJA OPERASI	120.000.000	98.775.200	82,3	21.224.800
5.40202.08.02.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000	98.775.200	82,3	21.224.800
5.40202.08.02.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000	98.775.200	82,3	21.224.800
5.40202.08.02.1.02.01	BELANJA BARANG	116.400.000	95.175.200	81,8	21.224.800
5.40202.08.02.1.02.01	BELANJA BARANG	116.400.000	95.175.200	81,8	21.224.800
5.40202.08.02.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	116.400.000	95.175.200	81,8	21.224.800
5.40202.08.02.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	116.400.000	95.175.200	81,8	21.224.800
5.40202.08.02.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.685.600	2.157.900	80,4	527.700
5.40202.08.02.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.685.600	2.157.900	80,4	527.700
5.40202.08.02.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	10.672.000	10.404.000	97,5	268.000
5.40202.08.02.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	10.672.000	10.404.000	97,5	268.000
5.40202.08.02.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	98.365.000	78.740.000	80,1	19.625.000
5.40202.08.02.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	98.365.000	78.740.000	80,1	19.625.000
5.40202.08.02.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.415.000	3.632.500	82,3	782.500
5.40202.08.02.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.415.000	3.632.500	82,3	782.500

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH/ (KURANG)
			Rupiah	%	
5.40202.08.02.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	262.400	240.800	91,8	21.600
5.40202.08.02.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	262.400	240.800	91,8	21.600
5.40202.08.02.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	3.600.000	3.600.000	100,0	0
5.40202.08.02.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	3.600.000	3.600.000	100,0	0
5.40202.08.02.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.600.000	3.600.000	100,0	0
5.40202.08.02.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.600.000	3.600.000	100,0	0
5.40202.08.02.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000	3.600.000	100,0	0
5.40202.08.02.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000	3.600.000	100,0	0
5.40202.08.03	FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH	875.000.000	788.597.400	90,1	86.402.600
5.40202.08.03	FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH	875.000.000	788.597.400	90,1	86.402.600
5.40202.08.03.1	BELANJA OPERASI	875.000.000	788.597.400	90,1	86.402.600
5.40202.08.03.1	BELANJA OPERASI	875.000.000	788.597.400	90,1	86.402.600
5.40202.08.03.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	875.000.000	788.597.400	90,1	86.402.600
5.40202.08.03.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	875.000.000	788.597.400	90,1	86.402.600
5.40202.08.03.1.02.01	BELANJA BARANG	2.896.000	2.436.900	84,2	459.100
5.40202.08.03.1.02.01	BELANJA BARANG	2.896.000	2.436.900	84,2	459.100
5.40202.08.03.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.896.000	2.436.900	84,2	459.100
5.40202.08.03.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.896.000	2.436.900	84,2	459.100
5.40202.08.03.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.332.800	1.131.900	84,9	200.900
5.40202.08.03.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.332.800	1.131.900	84,9	200.900
5.40202.08.03.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.240.000	1.092.000	88,1	148.000
5.40202.08.03.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.240.000	1.092.000	88,1	148.000
5.40202.08.03.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	192.000	85.000	44,3	107.000
5.40202.08.03.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	192.000	85.000	44,3	107.000
5.40202.08.03.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	131.200	128.000	97,6	3.200
5.40202.08.03.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	131.200	128.000	97,6	3.200
5.40202.08.03.1.02.02	BELANJA JASA	11.700.000	8.591.500	73,4	3.108.500
5.40202.08.03.1.02.02	BELANJA JASA	11.700.000	8.591.500	73,4	3.108.500
5.40202.08.03.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.700.000	8.591.500	73,4	3.108.500
5.40202.08.03.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.700.000	8.591.500	73,4	3.108.500
5.40202.08.03.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	11.700.000	8.591.500	73,4	3.108.500
5.40202.08.03.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	11.700.000	8.591.500	73,4	3.108.500
5.40202.08.03.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	860.404.000	777.569.000	90,4	82.835.000
5.40202.08.03.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	860.404.000	777.569.000	90,4	82.835.000
5.40202.08.03.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	860.404.000	777.569.000	90,4	82.835.000
5.40202.08.03.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	860.404.000	777.569.000	90,4	82.835.000
5.40202.08.03.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	860.404.000	777.569.000	90,4	82.835.000
5.40202.08.03.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	860.404.000	777.569.000	90,4	82.835.000
5.40202.08.04	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	1.865.000.000	1.692.302.750	90,7	172.697.250
5.40202.08.04	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	1.865.000.000	1.692.302.750	90,7	172.697.250
5.40202.08.04.1	BELANJA OPERASI	1.865.000.000	1.692.302.750	90,7	172.697.250
5.40202.08.04.1	BELANJA OPERASI	1.865.000.000	1.692.302.750	90,7	172.697.250
5.40202.08.04.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	1.865.000.000	1.692.302.750	90,7	172.697.250
5.40202.08.04.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	1.865.000.000	1.692.302.750	90,7	172.697.250
5.40202.08.04.1.02.01	BELANJA BARANG	4.901.000	4.318.900	88,1	582.100
5.40202.08.04.1.02.01	BELANJA BARANG	4.901.000	4.318.900	88,1	582.100
5.40202.08.04.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.901.000	4.318.900	88,1	582.100
5.40202.08.04.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.901.000	4.318.900	88,1	582.100
5.40202.08.04.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	716.000	526.900	73,6	189.100
5.40202.08.04.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	716.000	526.900	73,6	189.100
5.40202.08.04.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.480.000	2.300.000	92,7	180.000
5.40202.08.04.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.480.000	2.300.000	92,7	180.000
5.40202.08.04.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000	300.000	100,0	0
5.40202.08.04.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000	300.000	100,0	0
5.40202.08.04.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.405.000	1.192.000	84,8	213.000
5.40202.08.04.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.405.000	1.192.000	84,8	213.000
5.40202.08.04.1.02.02	BELANJA JASA	84.492.000	64.178.300	76,0	20.313.700
5.40202.08.04.1.02.02	BELANJA JASA	84.492.000	64.178.300	76,0	20.313.700
5.40202.08.04.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	56.292.000	46.551.500	82,7	9.740.500
5.40202.08.04.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	56.292.000	46.551.500	82,7	9.740.500
5.40202.08.04.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	54.150.000	46.551.500	86,0	7.598.500
5.40202.08.04.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	54.150.000	46.551.500	86,0	7.598.500
5.40202.08.04.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	2.142.000	0	0,0	2.142.000
5.40202.08.04.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	2.142.000	0	0,0	2.142.000
5.40202.08.04.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	28.200.000	17.626.800	62,5	10.573.200
5.40202.08.04.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	28.200.000	17.626.800	62,5	10.573.200
5.40202.08.04.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	28.200.000	17.626.800	62,5	10.573.200
5.40202.08.04.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	28.200.000	17.626.800	62,5	10.573.200
5.40202.08.04.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	1.775.607.000	1.623.805.550	91,5	151.801.450
5.40202.08.04.1.02.04	BELANA PERJALANAN DINAS	1.775.607.000	1.623.805.550	91,5	151.801.450
5.40202.08.04.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.775.607.000	1.623.805.550	91,5	151.801.450
5.40202.08.04.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.775.607.000	1.623.805.550	91,5	151.801.450
5.40202.08.04.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.728.197.000	1.623.805.550	94,0	104.391.450
5.40202.08.04.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.728.197.000	1.623.805.550	94,0	104.391.450
5.40202.08.04.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	47.410.000	0	0,0	47.410.000
5.40202.08.04.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	47.410.000	0	0,0	47.410.000

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH/ (KURANG)
			Rupiah	%	
DENI HENDARKO, S.Sos, MM. NIP. 19690623 199001 1 001					